



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
INSPEKTORAT**

**Jalan Andi Mas Jaya No. 19 Telp. (0471) 325398
PALOPO**

**LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA PALOPO TAHUN 2019**



Nomor : 800.043.04/ 052 / Inspektorat-K/IV/2020
Tanggal : 29 April 2020



PEMERINTAH KOTA PALOPO
INSPEKTORAT
Jalan Andi Masjaya No. 19 Telp. (0471) 325398
PALOPO

PERNYATAAN REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Palopo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palopo, 29 April 2020



Drs.H. Asir Mangopo, MM.
Pangkat Pembina Utama Madya
Nip. 19630501 199203 1 015



PEMERINTAH KOTA PALOPO
INSPEKTORAT
Jalan A. Mas Jaya No. 19 Telp. (0471) 325398
P A L O P O

Palopo, 29 April 2020

K e p a d a

Yth. **Walikota Palopo**
di -

Palopo.-

Nomor : 800.043.04/052/Inspektorat/IV/2020
Lampiran : -
Perihal : Hasil Reviu Laporan Kinerja
Pemerintah Kota Palopo TA.2019.-

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut :

A. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Palopo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

B. Dasar Pelaksanaan Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Tugas Inspektur Kota Palopo Nomor:094/082/Insp./IV/2020,tanggal 17 April 2020..

C. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan mulai tanggal 20 April sampai dengan 01 Mei 2020

D. Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk :

- 1) Membantu Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo
- 2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Pemerintah Kota Palopo, sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas

E. Sasaran Reviu

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja (LKj) Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019.

F. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah : penelaahan terhadap :

- 1) Format,
- 2) Mekanisme penyusunan dan
- 3) Substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019.

G. Susunan Tim Reviu

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Penanggungjawab | : Drs. H. Asir Mangopo, MM. |
| 2. Wakil penanggungjawab | : Baharuddin, SP |
| 3. Pengendali Teknis | : Drs.H. Syarifuddin, M.Si. |
| 4. Ketua Tim | : Herlina, SE |
| 5. Anggota | : |
| | H. Karyawan A. Ikhsan, SH |
| | Hamsir, SE |
| | Dewi Anriani, SE. |
| | Andi Raju, SE |
| | Habel Basongan, S.AN |

H. Simpulan dan Rekomendasi

Hasil Reviu Tim Inspektorat yang dilakukan terhadap penyajian draft Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut :

A.1 Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a) Dalam Bab I Pendahuluan :

- Telah memuat sasaran dan permasalahan pembangunan daerah
- Telah menyajikan penjelasan umum Instansi Pemerintah Kota Palopo antara lain : Gambaran Umum Kota Palopo (Luas dan Batas Wilayah, Jumlah Penduduk dan kondisi Topografi) , Susunan Perangkat Daerah (Sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 yang menetapkan 29 Dinas, 7 Badan, 2 Sekretariat, 9 Kecamatan), dan data jumlah PNS berdasarkan golongan.
- Beberapa catatan perbaikan dari Tim Reviu, telah ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo

b) Dalam Bab II Perencanaan Kinerja :

- Memuat Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019, yang merupakan target kinerja Pemerintah Kota Palopo. dengan menetapkan 5 (lima) Tujuan, 11 (sebelas) Sasaran dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja.
- Telah menampilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019.
- Beberapa catatan perbaikan dari Tim Reviu, telah ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo

c) Dalam Bab III, Akuntabilitas Kinerja

- LKj telah menyajikan capaian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019, secara memadai.
- LKj telah membandingkan realisasi kinerja dan capaian Kinerja tahun 2019 dan tahun 2018.

- LKj telah menyajikan perbandingan capaian Kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya, namun belum dengan standar nasional.
- LKj telah menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2019.
- LKj telah menyajikan realisasi anggaran (Pendapatan dan Belanja) Tahun 2019 setelah Perubahan.
- Beberapa catatan perbaikan dari Tim Reviu, telah ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo

d) Dalam Bab IV, Penutup

- LKj telah menyajikan simpulan umum capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019, yaitu sebesar **99,01 %**
- LKj telah menyajikan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan Kinerja di masa yang akan datang.
- Beberapa catatan perbaikan dari Tim Reviu, telah ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo.

A.2. Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap Mekanisme penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja IP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu, dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo.
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data lampiran yang memadai. Lampiran yang ada, yakni :
 - 1) Perjanjian Kinerja
 - 2) RKPD Tahun 2019.
 - 3) RPJMD Tahun 2018-2023
- c. Telah terdapat surat permintaan penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja, namun belum didukung dengan adanya SOP.

Penyampaian tersebut berupa surat permintaan data, yakni :

1. Surat Nomor :060/50/ORG/II/2020 Tanggal 29 Januari 2020 kepada Kepala Bappeda, Kepala Bapenda , Kepala Dinas PU,

- Kepala Dinas Perhubungan, Direktur RSUD, Kepala Dinas DPMPSP, Camat Wara Koa Palopo, perihal : Permintaan Data.
2. Surat Nomor :060/56/ORG/II/2020 Tanggal 6 Feb 2020 kepada para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Kota Palopo, perihal : Permintaan dokumen SAKIP.
 3. Surat Nomor :060/78/ORG/II/2020 Tanggal 13 Feb 2020 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, perihal : Permintaan data pendukung Jumlah Penduduk.
 4. Surat Nomor :060/79/ORG/II/2020 Tanggal 13 Feb 2020 kepada Kepala BKPSDM Kota Palopo, perihal : Permintaan data pendukung Jumlah PNS Kota Palopo.
 5. Surat Nomor :060/94/ORG/II/2020 Tanggal 24 Feb 2020 kepada Kepala BPKAD Kota Palopo, perihal : Permintaan data pendukung Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah 2019
- d. Penanggungjawab pengumpulan data/ informasi telah ditetapkan disetiap unit kerja, dengan Keputusan Walikota.
 - e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) diyakini keandalannya;
 - f. Bahwa dalam penjelasan LKj , telah diketahui oleh unit kerja terkait.
 - g. Dalam Penyusunan LKj Pemerintah Kota Palopo tahun 2019, bukan merupakan gabungan dari unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

A.3. Subtansi

Kesimpulan terhadap Subtansi laporan kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
- b) Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan Renstra /RPJMD Tahun 2018-2023;
- c) Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) dibuat secara formal; dan telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.

Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo untuk Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Inspektorat Kota Palopo sebagai bahan seperlunya.-

Palopo, April 2020

Mengetahui,
Wakil Penanggungjawab



Baharuddin, SP
Nip.19711201 199803 1 004

Menyetujui,
Inspektur,
Selaku Penanggungjawab,



Drs.H. Asir Mangopo, MM.
Pangkat :Pembina Utama Madya
Nip.19630501 199203 1 015

Tim Pemeriksa



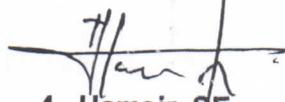
1. **Drs. H. Syarifuddin, M.Si.**
Nip.19730304 199202 1 001



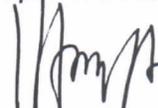
2. **Herlina, SE**
Nip. 19730315 200502 2 002



3. **H. Karyawan A. Ihsan**
Nip. 19620423 198603 1 019



4. **Hamsir, SE**
Nip. 19731001 200804 1 001



5. **Dewi Anriani, SE**
Nip. 19751121 200701 2 012



6. **Andi Raju, SE**
Nip.19750929 200901 2 003



7. **Habel Basongan, SE**
Nip.19800710 200701 1 010

FORMULIR CHECKLIST
REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN 2019

No	Pernyataan		Penjelasan	Y/T	
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	LKj telah menampilkan data Penting	Y
			Uraian singkat organisasi;	Y	
			Rencana & target kinerja yg ditetapkan;	Y	
			Pengukuran kinerja;	Y	
			Evaluasi & analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan & kondisi terakhir yang seharusnya terwujud	Y	
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	LKJ telah menyajikan ringkasan/ikhtisar PK tahun yang bersangkutan	Y
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	LKj telah menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.	Y
				Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang memadai (kriteria lihat template).	Y
				Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan (belum ada Perbandingan dengan beberapa tahun terakhir perbandingan lain yang diperlukan)	Y
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Minimal telah menyajikan form Pengukuran Kinerja dan lainnya yang terkait	Y
5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Dalam Bab IV sudah diuraikan ringkasan tentang upaya perbaikan kedepan khususnya terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target	Y		

		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	Y
II	Mekanisme Penyusunan	1	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	LKj disusun sesuai Tupoksi Organisasi penyusun atau Tim yang dibentuk dengan SK KDH	Y
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Untuk setiap sasaran yang disajikan didukung dengan data resmi dari masing-masing SKPD pelaksana	Y
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Adanya SOP atau Surat Edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	T
		4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	Adanya Surat Keputusan KDH tentang penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja khususnya berkaitan dengan penyusunan LKj	Y
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Data yang disajikan dalam LKj telah didukung dengan data resmi dari SKPD terkait	Y
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Analisis/penjelasan dalam LKj bersumber dari data kinerja unit kerja terkait	Y
		7	LKj IP Bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya.		Y
		1	Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja		Y

III	Substansi	2	Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis		Y
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		-
		4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja		Y
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.		Y
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		-
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Terdapat Perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, namun dengan standar nasional belum ada.	Y
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran		Y
		9	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai		-
		10	IKU dan IK telah SMART		Y



**PEMERINTAH
KOTA PALOPO**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KOTA PALOPO
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 dapat diselesaikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Palopo. Hal ini juga sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuju terciptanya **Good Governance** dan **Clean Government**. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Palopo tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

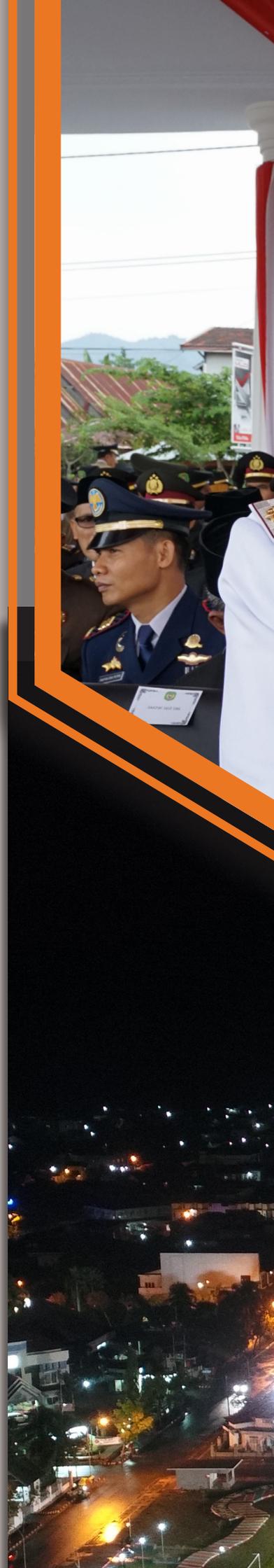
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 ini bermanfaat sehingga dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun mendatang

Palopo, 2020

WALIKOTA PALOPO,



Drs. H.M.JUDAS AMIR, MH





IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Palopo telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yang mengacu kepada Pedoman Penyusunan LAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang berisikan tentang keberhasilan, kegagalan, kegiatan yang belum sempat dilaksanakan, faktor pendukung keberhasilan dan hambatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palopo.

Tahun 2019 adalah pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kota Palopo tahun pertama, dalam upaya pencapaian tujuan secara umum melalui indikator-indikator sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018 - 2023. Kinerja yang diukur dalam LAKIP ini didasarkan atas dokumen RPJMD tahun 2018 - 2023, Renstra dan Penetapan Kinerja Daerah Kota Palopo tahun 2019. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palopo berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran, yaitu dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar **99,01%** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur serta teruji kelayakannya.

Dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palopo tentang Indikator Kinerja Utama, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja utama :
Capaian kinerja seluruh indikator kinerja adalah sangat tinggi atau melampaui target yang ditetapkan
- Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja :
Capaian kinerja seluruh indikator kinerja adalah sangat tinggi
- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja :
Capaian kinerjanya, sebanyak 2 indikator kinerja kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 1 indikator sasaran kategori tinggi dan 1 indikator kategori sedang
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :
Capaian kinerja semua indikator kinerjanya adalah kategori sangat tinggi

- Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :
Capaian kerjanya, sebanyak 1 indikator kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 1 indikator kategori sedang dan 1 indikator kategori sangat rendah

Hasil analisis pencapaian indikator kinerja terhadap 11 (sebelas) sasaran yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama, diketahui bahwa :

- ❖ 15 indikator kinerja utama atau 78,94% Pencapaian Kerjanya Sangat Tinggi,
- ❖ 1 indikator kinerja utama atau 5,2% Pencapaian Kerjanya Tinggi,
- ❖ 2 indikator kinerja utama atau 10,52% Pencapaian Kerjanya Sedang,
- ❖ 0 indikator kinerja utama atau 0,00% Pencapaian Kerjanya Rendah.
- ❖ 1 indikator kinerja utama atau 5,2% pencapaiannya sangat rendah

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja utama terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 11 sasaran yang mencakup 19 indikator kinerja, diketahui bahwa 15 indikator kinerja atau 78,94% mencapai kategori **Sangat Tinggi**, 1 indikator sasaran atau 5,2% kategori **Tinggi**, 2 indikator sasaran atau 10,52% memperoleh kategori **Sedang**, 0 indikator sasaran atau 0,00% **Rendah** , dan 1 indikator sasaran atau 5,2% kerjanya **Sangat Rendah**. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **99,01%** atau bermakna Sangat Tinggi. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019“ **SANGAT TINGGI**”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Maksud dan Tujuan	2
1. 3. Gambaran Umum Kota Palopo	3
1. 4. Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo	7
1. 5. Sasaran dan Permasalahan Pembangunan Daerah	9
1. 6. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2019	11
1. 7. Sistematika Penyusunan	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2. 1. Rencana Strategis	13
2. 2. Perjanjian Kinerja	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3. 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019	24
3. 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019	29
3. 3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019	37
BAB IV. PENUTUP	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip – prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai – nilai akuntabilitas menuju good governance yakni pemerintahan Kota Palopo yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat pula digunakan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2019 merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Palopo yang tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2018-2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan

pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Palopo selama Tahun Anggaran 2019;



2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Palopo pada Tahun 2019;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palopo di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Palopo dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

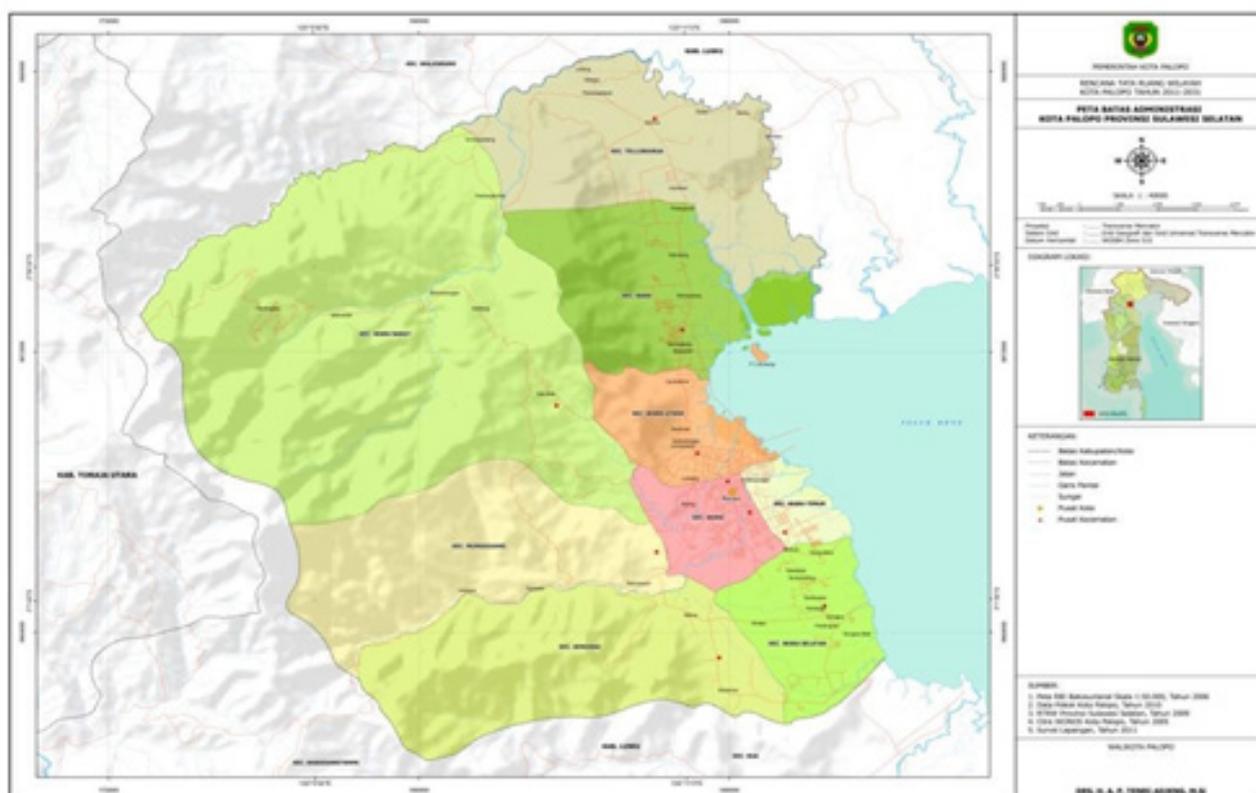
1.3. GAMBARAN UMUM KOTA PALOPO

1.3.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara administratif, Kota Palopo memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
- Sebelah Timur dengan Teluk Bone;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara.

Peta Administratif



Secara geografis, Kota Palopo terletak antara 2°53'.15" - 3°04'.08" Lintang Selatan dan 120°03'.10" -120°14'.34" Bujur Timur dengan luas wilayah ± 247,52 km² yang terdiri dari 9 Kecamatan dan

48 Kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km² dan yang tersempit adalah kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km². Adapun luas wilayah menurut

kecamatan di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Luas wilayah dan Pembagian Wilayah menurut Kecamatan di Kota Palopo
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
1.	Wara Selatan	4	10,66	4,31
2.	Sendana	4	37,09	14,98
3.	Wara	6	11,49	4,64
4.	Wara Timur	7	12,08	4,88
5.	Mungkajang	4	53,80	21,74
6.	Wara Utara	6	10,58	4,27
7.	Bara	5	23,35	9,43
8.	Telluwanua	7	34,34	13,87
9.	Wara Barat	5	54,13	21,87
Jumlah		48	247,52	100,00

Sumber : BPS Kota Palopo

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dengan jumlah yang besar tetapi kualitas yang baik akan lebih berguna dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara umum. Jumlah penduduk Kota Palopo Tahun 2019 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo adalah

181,438 jiwa. Penyebaran penduduk di setiap kecamatan masih belum merata. Kecamatan Wara Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 38,192 jiwa dan Kecamatan Sendana merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 7,233 jiwa.





Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan
di Kota Palopo Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan per Km ²
1.	Wara Selatan	15.773	10,66	1.479
2.	Sendana	7.233	37,09	195
3.	Wara	32.412	11,49	2.820
4.	Wara Timur	38.192	12,08	3.161
5.	Mungkajang	9.305	53,80	173
6.	Wara Utara	21.194	10,58	2003
7.	Bara	29.483	23,35	1263
8.	Telluwana	16.080	34,34	468
9.	Wara Barat	11.766	54,13	217
Jumlah		181.438	247,52	733

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.3.3 Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km² sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km². Untuk lebih jelasnya,

luas wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng
Kota Palopo Menurut Kecamatan Tahun 2019**

	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km ²)			
			0-2 %	2-15 %	15-40 %	> 40 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	2,132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9,272
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	34,97
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	48,717
Jumlah		247,52	76,677	8,951	68,933	57,989

Sumber : BPS Kota Palopo

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 mdl, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 mdl, dan sekitar 12,39 % terletak diatas ketinggian lebih dari 1.000 mdl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Ketinggian Daerah (Mdl)				
			0 - 25	26-100	101-500	501-1000	> 1000 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	-	2.132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9.272	-
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	13.450	21.520
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	35.184	13.533
Jumlah		247,52	8,17	8,951	66,801	60.038	35.053

Sumber : BPS Kota Palopo

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.



1.4 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PALOPO

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kota Palopo;
2. Sekretariat DPRD Kota Palopo;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Daerah (7 Badan) :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan;

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Daerah (29 Dinas) :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 7. Dinas Tenaga Kerja;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Dinas Perdagangan;
 10. Dinas Perindustrian;
 11. Dinas Kebudayaan;
 12. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 13. Dinas Pemuda dan Olah raga;
 14. Dinas Pendidikan;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Pertanahan;
 18. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

- | | |
|---|--|
| 19. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
20. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
21. Dinas Ketahanan Pangan;
22. Dinas Komunikasi & Informatika;
23. Dinas Persandian & Statistik;
24. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
25. Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Dinas Kearsipan;
27. Dinas Perpustakaan;
28. Dinas Transmigrasi;
29. Dinas Perikanan | 6. Rumah Sakit Umum Daerah :
1. RSUD Sawerigading
7. Kecamatan (9 Kecamatan) :
1. Kecamatan Wara;
2. Kecamatan Wara Utara;
3. Kecamatan Wara Selatan;
4. Kecamatan Wara Barat;
5. Kecamatan Wara Timur;
6. Kecamatan Bara;
7. Kecamatan Mungkajang;
8. Kecamatan Sendana;
9. Kecamatan Telluwanua |
|---|--|

1.4.1 SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang

pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah. Jumlah Pegawai yang ada di Pemerintah Kota Palopo seluruhnya sebesar 4.507 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Instansi/Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Daerah	2	45	83	24	154
2	Sekretariat KPU	-	-	1	1	2
3	Sekretariat DPRD	-	16	22	4	42
4	RSUD	4	31	343	96	430
5	Inspektorat	-	3	29	15	47
6	Badan Daerah	1	44	166	32	243
7	Dinas Daerah	4	275	1833	883	2996
8	Kecamatan	-	33	101	10	144
9	Kelurahan	2	107	306	-	409
Jumlah		13	550	2.840	1.065	4507

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo

1.5. SASARAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH



Meningkatnya
Derajat
Pendidikan
Masyarakat **S1**

- Belum meratanya pemenuhan sarana prasarana serta SDM kependidikan dalam mendukung akses/partisipasi pada pendidikan dasar, pemenuhan layanan minimal pendidikan dasar, dan peningkatan kualitas pendidikan dasar.



Meningkatkan
Derajat
Kesehatan
Masyarakat **S2**

- Belum meratanya pemenuhan sarana prasarana serta SDM kesehatan dalam mendukung akses masyarakat atas layanan kesehatan, pemenuhan pelayanan minimal kesehatan, pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat serta belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.



Meningkatnya
derajat
kesejahteraan
sosial
masyarakat **S3**

- Stagnasi produksi dan produktivitas serta daya saing produk sektor perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja yakni pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta perikanan.
- Belum optimalnya perkembangan sektor perekonomian sekunder dan tersier terutama perdagangan, industri dan jasa perkotaan.
- Belum optimalnya perkembangan investasi dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk pada sektor ekonomi kreatif.
- Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja karena terbatasnya akses untuk meningkatkan keterampilan kerja dan etos kewirausahaan.



Meningkatnya
Kapasitas dan
Layanan
Infrastruktur
Perkotaan **S4**

- Terbatasnya kemampuan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Kurang berkembangnya kesadaran masyarakat atas penataan lingkungan permukiman dan perumahan.



Meningkatnya
konektifitas
dan aksesibilitas
wilayah serta
infrastruktur
strategis daerah **S5**

- Belum efektifnya penertiban penggunaan terminal dan pelabuhan



Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
lingkungan
hidup **S6**

- Bertambahnya intensitas konversi lahan pertanian menjadi peruntukan non pertanian serta perambahan atas lokasi hutan.
- Adanya tekanan ekologi dan sosial pada kawasan pesisir akibat perluasan pemukiman dan perkembangan pusat aktivitas perekonomian.



**Meningkatnya
kualitas
kinerja
penyeleng-
garaan
pemerintahan**

S7

- Sumber Daya Aparatur yang menyelenggarakan pemerintahan yang belum memadai
- Kualitas dan ketersediaan data dan informasi pembangunan serta Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) belum optimal, termasuk pada tingkat PD.
- Tingkat kesesuaian dan kualitas perencanaan kinerja tingkat kota dan PD masih lemah akibat asistensi, verifikasi dan sinkronisasi yang belum memadai.
- Kualitas dan transparansi atas proses pengadaan barang dan jasa serta keterbukaan informasi publik lainnya masih terbatas dan belum *massive*.



**Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik**

S8

- Belum seluruh Perangkat Daerah menerapkan SOP/ SPM secara konsisten pada pelayanannya.
- Tidak tercukupinya kebutuhan sarana/ prasarana, fasilitas, alokasi pembiayaan dan SDM dalam penyelenggaraan SPM pelayanan dasar.
- Kualitas dan ketersediaan data kinerja SPM serta akuntabilitas kinerja pencapaian SPM pada perangkat daerah penyelenggara urusan masih lemah.



**Meningkatnya
perluasan
kesempatan
berusaha dan
produktifitas
tenaga kerja**

S9

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perniagaan
- Rendahnya minat masyarakat untuk berusaha disektor swasta
- Belum semua koperasi aktif untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat
- Lapangan kerja yang tersedia masih sangat terbatas dibandingkan jumlah angkatan kerja yang ada.
- Penyediaan Data dan Informasi bursa ketenagakerjaan masih sangat terbatas



**Meningkatnya
produksi dan
produktifitas**

S10

- Pertumbuhan perekonomian masih di dominasi pada sektor konsumsi.
- Belum bergerakinya sektor jasa



**Meningkatnya
kontribusi
sektor pariwisata
dan ekonomi
kreatif dalam
perekonomian daerah**

S11

- Sangat minmnya promosi pariwisata yang dilaksanakan.
- Belum semua potensi dan produk ekonomi kreatif dapat di promosikan secara maksimal
- Potensi pariwisata belum di optimalkan pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kunjungan pariwisata.

1.6 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Sesuai perkembangan dan kondisi Kota Palopo sampai dengan Tahun 2017, beberapa isu strategis yang akan menjadi fokus penanganan Kota Palopo pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas pelayanan dasar
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang sustainability dan penataan lingkungan yang memperhatikan aspek budaya
3. Pemenuhan kebutuhan dan pola konsumsi pangan berkualitas
4. Peningkatan nilai tambah, pengembangan sektor jasa, perdagangan dan industri rumah tangga
5. Ketertiban dan kenyamanan daerah serta partisipasi masyarakat dalam pemilu
6. Kinerja pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik berkualitas.

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran umum Kota Palopo, dan Permasalahan dan Isu-isu Staregis

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2019 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam rangka peningkatan kinerjanya.







BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program / kegiatan, didalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Kinerja Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta menyediakan ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, rencana kinerja yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

2.1. Rencana Strategis

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kota Palopo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 tahun (2018-2023). Rencana Kinerja Pemerintah Kota Palopo mencakup tujuan, sasaran, serta strategi untuk mencapai agenda dan sasaran.

RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Palopo saat ini, serta mencermati peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Walikota dan Wakil Walikota merumuskan Visi Kota Palopo tahun 2018 – 2023 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

“Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023



Pada visi tersebut terdapat 3 (tiga) kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa Kota ini bergerak kearah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu memberi solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan publik yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan, Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya lokal.

Palopo maju, inovatif dan berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

2.1.2. Misi

Sesuai dengan visi tersebut diatas dan sabagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;
5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

2.1.3. Tujuan ,Sasaran dan Indikator Kinerja

Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat priorotas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan, sasaran dan indikator pembangunan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023		
Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3
Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat (T.1)	Indeks pembangunan manusia
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Angka rata – rata lama sekolah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Angka harapan hidup
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin

1	2	3	
Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks daya saing infrastruktur	
		Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase areal kawasan kumuh
		Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Persentase layanan angkutan darat
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir Persentase luas ruang terbuka hijau
Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan	Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)	Indeks reformasi birokrasi	
		Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Level SPIP daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB	
		Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka
		Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	PDRB per kapita
Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)	Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam tahun 2019 Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan 5 (lima) tujuan, 11 (sebelas) sasaran, dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang akan dicapai dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo.

Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019
1		2	3	4
Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup masyarakat (T.1)		Indeks Pembangunan Manusia	Point	77,86
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Angka rata – rata lama sekolah	Tahun	10.36
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,32
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin	Persen	8,1
Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)		Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	80
	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0
	Meningkatnya konektivitas dan Aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Persentase layanan angkutan darat	Persen	11,02
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir	Ha	18
Persentase luas ruang terbuka hijau		Persen	76,83	



1		2	3	4
Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64
	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai	70
		Level SPIP daerah	Point	3
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Point	80,78
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)		Pertumbuhan PDRB	Persen	7,14
	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	9,81
	Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	PDRB per kapita	Juta/Thn	37,1
Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)		Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	Persen	2
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	0,15
		Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	2,80

2.3. Pendapatan dan Belanja Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel dibawah ini :

Pendapatan	1.005.856.128.898,00
Pendapatan Asli Daerah	169.497.871.831,00
Pendapatan Pajak Daerah	34.725.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	17.990.922.024,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.496.932.396,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.285.017.411,00
DANA PERIMBANGAN	741.592.073.052,00
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	18.754.808.000,00
Dana Alokasi Umum	537.722.702.000,00
Dana Alokasi Khusus	185.114.563.052,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	94.766.184.015,00
Pendapatan Hibah	19.177.800.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.438.856.815,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13.007.644.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.141.883.200,00
Pendapatan Lain-lain	00,00
BELANJA	1.008.057.603.046,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	424.761.010.744,00
Belanja Pegawai	405.484.691.744,00
Belanja Bunga	2.196.367.000,00
Belanja Hibah	11.987.300.000,00
Belanja Bantuan Sosial	3.247.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan partai politik	845.152.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	583.296.592.302,00
Belanja Pegawai	57.739.807.429,00
Belanja Barang dan Jasa	302.528.328.430,00
Belanja Modal	223.028.456.443,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.142.849.148,00

Sumber: BPKAD Kota Palopo Tahun 2019



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah pengukuran akuntabilitas kinerja yang dapat diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pada akhir pelaksanaan rencana kerja tahunan dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan

sebagaimana yang telah direncanakan pada awal tahun. Pengukuran tersebut merupakan manifestasi simbolis dari komitmen akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Data kinerja dimaksud dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data. Kemudian capaian kerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja.

Adapun penanggungjawab data kinerja tiap – tiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	
Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat (T.1)	Indeks Pembangunan Manusia	
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Angka rata – rata lama sekolah	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Angka harapan hidup	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin	Dinas Sosial, Dinas Perkim,Dinas PP&KB,Dinas PPA,Dinas Perikanan, Dinas Pertanian,peternakan, perkebunan,Dinas Perdagangan,Dinas Ketahanan Pangan, SatPolPP, Setda, Bappeda, BakesbangPol Linmas
Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks daya saing infrastruktur	
	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase areal kawasan kumuh	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LH, Dinas Transmigrasi
	Meningkatnya konektifitas dan Aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Persentase layanan angkutan darat	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir	Dinas PUPR, Dinas LH, Bappeda
		Persentase luas ruang terbuka hijau	Dinas PUPR, Dinas LH, Bappeda

1	2	3	
Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan	Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)	Indeks reformasi birokrasi	
	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Persandian dan Statistik, Dinas Kearsipan, Bapenda, Sekretariat DPRD, Setda
		Level SPIP daerah	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Persandian dan Statistik, Dinas Kearsipan, Bapenda, Sekretariat DPRD, Setda
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Damkar, Sat Pol PP, DPMPSTP, Dinas LH, Dinas PP&KB, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Pertanahan, Dinas Kearsipan, Setda, Balitbangda, Dinas Kominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, BakesbangPol, Kecamatan
Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB	
	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka	Dinas Tenaga Kerja, Dinas PPPA, DPMPSTP
	Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	PDRB per kapita	Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

1	2	3	
Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)	Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekraf,Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga,Dinas Perdagangan,Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan,Dinas PUPR
		Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekraf,Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga,Dinas Perdagangan,Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan,Dinas PUPR

3.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019

Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2019 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Palopo dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palopo tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91%	Sangat Tinggi
2	76 % sd. 90 %	Tinggi
3	66 % sd. 75 %	Sedang
4	51 % sd. 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Indikator Kinerja Utama atau IKU Pemerintah Kota Palopo merupakan indikator kinerja yang menjadi *inti (core)* atas keberhasilan pembangunan di Kota Palopo. Indikator ini dipilih sebagai ukuran keberhasilan atas penanganan permasalahan pembangunan oleh Pemerintah Kota Palopo selama lima tahun ke depan sampai dengan 2023.

Sesuai RPJMD periode 2018-2023, IKU Kota Palopo sebanyak 19 Indikator, yang merupakan ukuran keberhasilan atas 5 Tujuan dan 11 sasaran pembangunan daerah. IKU Kota Palopo 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo Nomor **398/IX/Tahun 2019**.

Berikut adalah tabel capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019, sesuai sasaran, indikator sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja :

Tabel 3.1.2
Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Palopo
Tahun 2019

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja	Kategori Predikat Kinerja
1	2	3	4		
Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup masyarakat (T.1)	Indeks pembangunan manusia	77,86	77,98	100,20%	SANGAT TINGGI

1	2	3	4		
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Angka rata – rata lama sekolah	10,36	10,75	103,8%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Angka harapan Hidup	70,32	70,79	100,7%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin	8,10	7,82	103,6%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks daya saing infrastruktur	80	85,77	107,21%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase areal kawasan kumuh	0	0,15	99,85%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Persentase layanan angkutan darat	11,02	12,30	112%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir	18	12,38	145%	SANGAT TINGGI
	Persentase luas ruang terbuka hijau	76,83	76,95	100,16%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)	Indeks reformasi birokrasi	64	52,70	82,34%	TINGGI
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah	70	52,43	74,90%	SEDANG
	Level SPIP daerah	3	3	100%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	80,78	83,40	102,85%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB	7,14	6,75	94,5%	SANGAT TINGGI

1	2	3	4		
Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka	9,81	10,32	95,10%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	PDRB per kapita	37,10	43,02	116,0%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)	Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	2	1,51	75,50%	SEDANG
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	0,15	0,05	33,33%	SANGAT RENDAH
	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah	2,80	3,76	134,38%	SANGAT TINGGI
RATA RATA KINERJA CAPAIAN IKU				99,01%	SANGAT TINGGI

Hasil analisis pencapaian indikator kinerja terhadap 11 (sebelas) sasaran yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama, diketahui bahwa :

- ❖ 15 indikator kinerja utama atau 78,94% Pencapaian Kinerjanya Sangat Tinggi,
- ❖ 1 indikator kinerja utama atau 5,2% Pencapaian Kinerjanya Tinggi,
- ❖ 2 indikator kinerja utama atau 10,52% Pencapaian Kinerjanya Sedang,
- ❖ 0 indikator kinerja utama atau 0,00% Pencapaian Kinerjanya Rendah.
- ❖ 1 indikator kinerja utama atau 5,2% pencapaiannya sangat rendah

Sesuai hasil pengukuran sasaran dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019, kinerja Pemerintah Kota Palopo berada pada angka 99,01 % atau Sangat Tinggi. Kinerja tahun 2019 tersebut, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2018 yang hanya berada pada posisi 87,50% atau Tinggi.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang posisi pencapaian kinerja tahun 2019 Pemerintah Kota Palopo, apakah lebih baik ataukah belum lebih baik , berikut adalah tabel perkembangan sekaligus perbandingan capaian kinerja tahun 2019, terhadap capaian tahun sebelumnya dan posisinya terhadap target pada masa akhir kinerja RPJMD yakni tahun 2023.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2019 Terhadap Capaian Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD (2023) Pemerintah Kota Palopo

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	REALISASI 2019	TARGET AKHIR RPJMD 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA S.D 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023
1	2	3	4	5
Indeks pembangunan manusia	77,30	77,98	79,25	98,40
Angka rata – rata lama sekolah	10,51	10,75	10,56	101,80
Angka Harapan Hidup	70,49	70,79	70,40	100,55
Persentase penduduk miskin	7,94	7,82	6,08	128,62
Indeks daya saing infrastruktur	n/a	85,77	84	102,11
Persentase areal kawasan kumuh	0,82	0,15	0	99,85
Persentase layanan angkutan darat	9,90	12,30	12,86	95,65
Luas kawasan terdampak banjir	20,47	12,38	2	43,80
Persentase luas ruang terbuka hijau	76,72	76,95	77,20	99,68
Indeks Reformasi Birokrasi	50,09	52,70	72	73,19
Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah	50,02	52,43	85	61,7
Level SPIP daerah	2,84	3	3	100
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	81,81	83,40	82,03	101,16
Pertumbuhan PDRB	7,25	6,75	7,22	93,49
Tingkat pengangguran terbuka	11,60	10,32	8,07	127,88
PDRB per kapita	40,32	43,02	37,8	113,81
Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	1,50	1,51	2,60	58,07
Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah	0,09	0,05	0,24	20,83
Kontribusi ekonomi kreatif terhadap pendapatan asli daerah	3,65	2,80	2,88	97,22

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yang capaian kinerjanya “Lebih Baik” dari capaian Tahun 2018 sebanyak 16 (enam belas)

indikator. Jumlah indikator kinerja utama tahun 2019 yang capaian kinerjanya “Belum lebih baik dari capaian tahun 2018 sebanyak 3 (Tiga) indikator. Dan jumlah indikator kinerja utama tahun 2019 yang capaian kinerjanya “Melebihi” target akhir RPJM Tahun 2023 sebanyak 7 (Tujuh) Indikator.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019

Tujuan pembangunan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) tujuan dengan 5 (lima) indikator tujuan. Hasil pengukuran capaian tujuan Pemerintah Kota Palopo 2019, hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

No	Tujuan ke	Nilai Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	100.20	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	107.21	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)	82,34	Tinggi
4	Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	94.54	Sangat Tinggi
5	Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)	75.50	Tinggi
TOTAL NILAI RATA-RATA TUJUAN DAN PREDIKAT KINERJA		91.93	Sangat Tinggi

Tujuan I : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas diketahui bahwa capaian kinerja tujuan pembangunan daerah untuk tujuan 1(satu) sebesar **100,2** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan rata-rata kelompok, pada tujuan pertama nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian tujuan, sebab tujuan pertama hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Tujuan I

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.86	77.98	100.20	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100.20	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN I				100.20	Sangat Tinggi

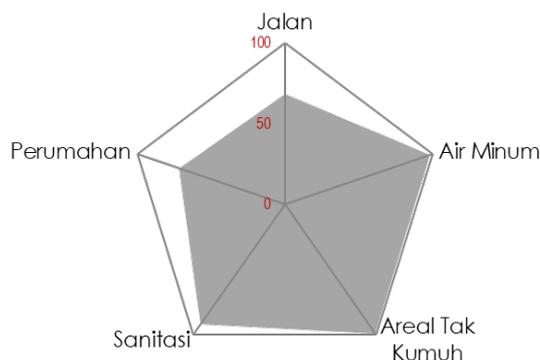
Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo 2019 (77.98), selain melampaui target 2019 (77.86), capaiannya juga lebih baik dari tahun 2018 (77.30). Dari 23 Kabupaten Kota di Sulsel, IPM Kota Palopo menempati peringkat kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar (82.25). Pertumbuhan IPM 2019 Kota Palopo (0.88), juga lebih baik dari tahun 2018 (0.77).

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA S.D 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.30	77.98	79.25	98.40

Tujuan II : Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)

Indeks daya saing infrastruktur adalah indikator yang memperlihatkan kemantapan infrastruktur dasar yang terdiri atas kualitas jalan, akses air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan pemilikan rumah. Tiap indikator memiliki bobot yang sama dan indeks didapatkan melalui rerata dari nilai setiap indikator tersebut. **Semakin penuh spiderweb** yang dibentuk (gambar di bawah), maka semakin berdaya saing infrastruktur suatu wilayah pada aspek yang diukur.



Berdasarkan analisis, didapatkan indeks 85,77. Nilai ini lebih tinggi 5,77 poin dibanding target 2019. Sementara itu, jika dikomparasi dengan target akhir RPJMD Kota Palopo, maka capaian ini telah melampaui dari target 84 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian terhadap RKPDP 2019 adalah 107,21%, sedangkan terhadap RPJMD 2023 adalah 102,11%. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar di Kota Palopo semakin baik dan semakin berdayasaing.

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja Tujuan II

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks Daya Saing Infrastruktur	80	85,77	107,21	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				107,21	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN II				107,21	Sangat Tinggi

Indeks Daya Saing Infrastruktur Kota Palopo 2019 yaitu 85,77, capaian ini jauh melampaui target tahun 2019 yaitu 80 bahkan capaian ini telah melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 84.

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan II

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA S.D 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
Daya Saing Infrastruktur	n/a	85,77	84	102,11

Tujuan III : Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas diketahui bahwa capaian kinerja tujuan pembangunan daerah untuk tujuan 3 (tiga) sebesar **82,34** atau memiliki predikat **Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan rata-rata kelompok, pada tujuan ketiga nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian tujuan, sebab tujuan ketiga hanya memiliki 1(satu) IKU.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Tujuan III

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Terwujudnya Birokrasi Profesional kompetitif dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	64	52,70	82,34	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				82,34	Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN I				82,34	Tinggi

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo tahun 2019 adalah 52,70 atau kategori CC. Capaian ini belum memenuhi target tahun 2019 yaitu 64 dan masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 72. Sehingga capaian kinerja indikator terhadap target akhir RPJMD adalah 73,19%.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan III

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA S.D 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	50,09	52,70	72	73%

Tujuan IV ; Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada tujuan keempat sebesar **94.54**, dengan nilai kinerja capaian tujuan sebesar **94.54** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan rata-rata kelompok, pada tujuan keempat, nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian tujuan, sebab tujuan keempat hanya memiliki satu IKU.

Tabel 3.2.8
Capaian Kinerja Tujuan IV

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB (%)	7,14	6,75	94,54	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				94,54	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN IV				94,54	Sangat Tinggi

Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019 yaitu sebesar 6,75, sedikit melambat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai nilai 7,52 dan belum memenuhi target 2019 yaitu 7.14. Meski demikian, Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019, masih berada diatas pertumbuhan PDRB nasional yaitu 5.02, pertumbuhan PDRB Kota Pare-Pare sebesar 6.65 dan Kabupaten Luwu sebesar yang hanya sebesar 6.26. Namun, pencapaian Kota Palopo ini belum lebih baik daripada Luwu Utara yang telah mencapai nilai 7.11 , Kota Makassar sebesar 8.79 dan pertumbuhan PDRB Sulsel yang sebesar 6.92.

Tabel 3.2.9
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA S.D 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
Pertumbuhan PDRB	7,25	6,75	7,22	93,49

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2017- 2019

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2017	4.745,90	7,17
2018	5.102,99	7,52
2019	5.447,36	6,75

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

**PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku
 (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2017-2019**

No	Bidang /Urusan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.155,96	1.232,24	1.301,47
2	Pertambangan & Penggalian	11,56	12,16	12,39
3	Industri Pengolahan	184,74	197,01	216,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,35	5,81	6,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,25	12,50	13,55
6	Konstruksi	1.050,45	1.194,98	1.330,13
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.510,15	1.723,39	1.938,86
8	Transportasi dan Pergudangan	389,04	432,45	475,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78,80	85,98	93,72
10	Informasi dan Komunikasi	261,93	301,91	335,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	535,11	566,53	579,66
12	Real Estat	329,89	358,34	384,06
13	Jasa Perusahaan	5,92	6,72	7,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	479,89	580,05	616,97
15	Jasa Pendidikan	270,34	309,44	342,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153,71	171,40	184,63
17	Jasa Lainnya	80,86	94,22	103,82
PDRB ADHB		6.514,94	7.285,14	7.942,48

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palopo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 7,94 triliun rupiah atau naik sebesar 657 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2017-2019

No	Bidang /Urusan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	803,17	830,61	871,74
2	Pertambangan & Penggalian	6,54	6,71	6,82
3	Industri Pengolahan	125,48	129,18	139,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,37	5,67	5,89
5	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,65	14,75	15,42
6	Konstruksi	696,64	734,33	779,14
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.183,42	1.291,73	1.421,61
8	Transportasi dan Pergudangan	259,99	286,15	312,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55,75	59,80	64,55
10	Informasi dan Komunikasi	267,54	303,02	335,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	376,91	383,21	382,09
12	Real Estat	222,55	233,02	246,38
13	Jasa Perusahaan	4,22	4,61	5,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	315,27	368,09	380,14
15	Jasa Pendidikan	224,20	247,46	262,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124,96	137,06	145,79
17	Jasa Lainnya	60,24	67,61	73,88
PDRB ADHK		4.745,90	5.102,99	5.447,36

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palopo, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 5,44 triliun rupiah atau naik sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

**Kontribusi PDRB Kota Palopo terhadap PDRB Sulawesi Selatan
 Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016– 2018 (Persen)**

Tahun	PDRB Sulawesi Selatan (Milliar Rp)	PDRB Kota Palopo (Milliar Rp)	% Kota Palopo terhadap Sulawesi Selatan
2017	415.588,20	6.514,94	1,57
2018	461.719,49	7.285,14	1,58
2019	504.746,87	7.942,48	1,57

Nilai PDRB Kota Palopo di tahun 2019 sebesar 7,94 triliun rupiah memberikan kontribusi sebesar 1,57 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2019 struktur perekonomian Palopo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1)Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 2)Kontruksi; dan 3)Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palopo.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palopo pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 24,41 persen (angka ini meningkat dari 23,66 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,75 persen, kemudian disusul oleh Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,39 persen.

Tujuan V : Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas diketahui bahwa capaian kinerja tujuan pembangunan daerah untuk tujuan 5 (lima) sebesar **75,50** atau memiliki predikat **Sedang**. Nilai ini merupakan perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap peningkatan PDRB Kota Palopo. Lapangan usaha yang berkontribusi terhadap pencapaian target PAD sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah objek wisata itu sendiri, lapangan usaha penyediaan akomodasi , makan minum dan jasa lainnya. Nilai PDRB Kota Palopo Tahun 2019 pada angka Rp. 7.942.480.000.000,- sementara jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 119.671.142.500,- atau berkontribusi sebesar 1,51%. Ini berarti masih dibawah target 2019 yang berada pada angka 2%. Sehingga realisasi kinerja tujuan dari indikator tujuan ke lima hanya sebesar 75,50% dari target yang ditetapkan.

Sesuai metode pengukuran berdasarkan rata-rata kelompok, pada tujuan pertama nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian tujuan, sebab tujuan kelima hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.2.9
Capaian Kinerja Tujuan V

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Terhadap PDRB	2	1,51	75,50	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				75,50	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN V				75,50	Sangat Tinggi

Kontribusi pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kota Palopo tahun 2019 sebesar 1,51% yang berarti sebesar 58,07 % dari target akhir RPJMD Kota Palopo Tahun 2023 seperti yang di gambarkan pada tabel 3.2.10.

Tabel 3.2.10
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan V

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA S.D 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB	1,5	1,51	2,6	58,07

3 . 3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019

Sasaran pembangunan Kota Palopo sebanyak 11(sebelas) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Palopo 2019 sebagai berikut

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah
Kota Palopo Tahun 2019

No	Sasaran ke	Nilai Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	103,80	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	100,70	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	103,60	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	99,85	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	112	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup (S.6)	122,58	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	100	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	102,85	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	95,10	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	116	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	83,79	Tinggi
TOTAL NILAI RATA-RATA SASARAN DAN PREDIKAT KINERJA		103,66	Sangat Tinggi

Sasaran I ; Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran satu sebesar **103.76** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **103.76** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan rata-rata kelompok, pada sasaran pertama nilai capaian indikator sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran pertama hanya memiliki 1 indikator kinerja.

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.36	10.75	103.8	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				103.8	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN I				103.8	Sangat Tinggi

Sesuai RPJMD Kota Palopo 2018-2023, Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan derajat pendidikan masyarakat adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dan sesuai hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pertama yang memiliki hanya 1 (satu) Indikator Kinerja, angka atau nilai rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 103.8%. Sesuai skala ordinal yang ada, predikat kinerjanya adalah **SANGAT TINGGI**. Berikut adalah hasil pengukuran kinerja indikator sasaran pembangunan daerah pertama Kota Palopo.

Tabel 3.3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Kota Palopo 2019

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RP-JMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2019	Realisasi 2019			
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.51	10.36	10.75	103.8	10.56	101.80

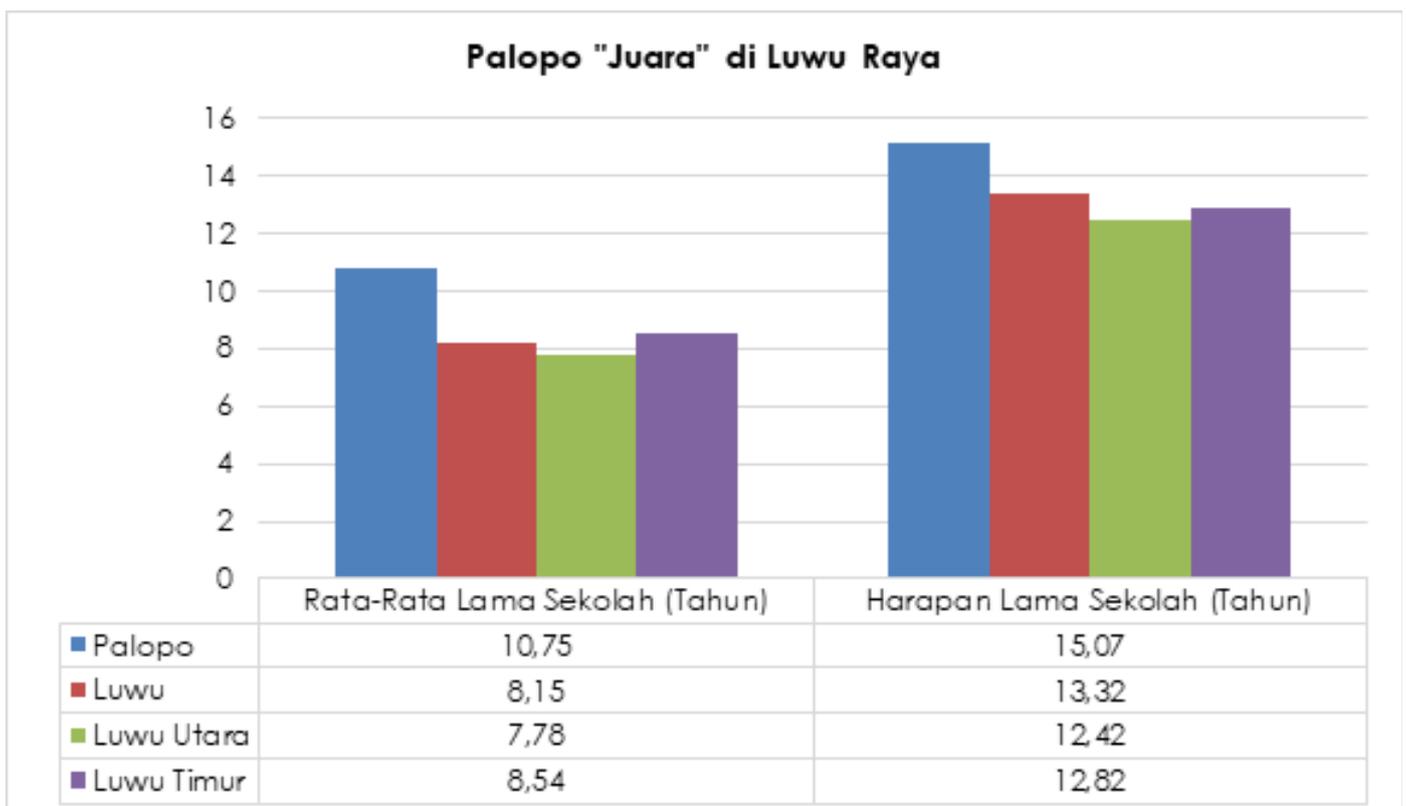
Angka rata-rata lama sekolah di Kota Palopo tahun 2019 sebesar 10.75 Tahun. Ini lebih baik dari angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 yang berada pada angka 10.51 Tahun atau menguat 0.24 Point. Capaian ini juga melebihi target Kota Palopo yang berada pada angka 10.36 Tahun.

Indikator lainnya yang juga mencerminkan meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kota Palopo adalah Harapan Lama Sekolah. Dimana pada tahun 2019 sebesar 15.07 Tahun. Kondisi ini juga lebih baik dibandingkan tahun 2018 yang berada pada angka 15.06 Tahun.

Jika dikomparasikan dengan daerah/kota lain, rata - rata lama sekolah Kota Palopo 2019 lebih baik daripada rata-rata lama sekolah nasional 2019 (8.34 Tahun), Rata-Rata Sulsel (8.26 Tahun), Kota Pare-Pare (10.3 Tahun), namun masih dibawah Kota Makassar (15.5 Tahun).

Namun di jazirah Luwu Raya, beberapa kabupaten yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Kota Palopo, yakni Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kota Palopo 2019 adalah yang terbaik/paling tinggi.

Grafik perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo untuk memastikan bahwa sasaran pertama ini bisa dicapai adalah :

- a. Memastikan tidak ada peserta didik pendidikan dasar yang putus sekolah karena persoalan keterbatasan biaya melalui pelaksanaan program pendidikan gratis.
- b. Menyediakan seragam dan peralatan sekolah secara cuma-cuma (gratis) bagi seluruh peserta didik, yang baru tamat dan akan melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya, dan masih menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo.
- c. Pada daerah-daerah terluar Kota Palopo, Pemerintah menyediakan bis sekolah, untuk dimanfaatkan para siswa untuk mengakses keberadaan lembaga pendidikan yang belum diakses angkutan umum secara maksimal.
- d. Memastikan bahwa semua sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palopo, mengelola dana BOS Pendidikannya secara baik dan benar, sehingga mampu meringankan beban biaya atas pendidikan yang dirasakan masyarakat.
- e. Memastikan bahwa upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, baik pada tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), SD dan SMP dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dengan system kolaborasi. Misalnya mengembangkan sarana jalan (oleh Dinas PU) dan meningkatkan kelancaran/ketersediaan transportasi angkutan umum/public (oleh Dishub) yang lebih optimal dari dan menuju lokasi sarana pendidikan.
- f. Memastikan bahwa setiap tahunnya, penganggaran untuk pembangunan pendidikan di Kota Palopo memenuhi aspek monetary spending sebesar 20% dari total APBD Kota Palopo. Dimana pada tahun 2019 jumlah belanja urusan pendidikan mencapai 20.93% dari total APBD (belanja) 2019 Kota Palopo melebihi spending monetary pendidikan.

Tabel 3.3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 dan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
103.76	98,06

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 47,410,199,000 yang dikelola oleh dua perangkat daerah yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 46,490,466,560 atau 98,06%, yang mampu menghasilkan kinerja sasaran pada angka 103.76. Jumlah program yang dilaksanakan untuk mengkontribusi sasaran pertama sebanyak 9 dan kegiatan sebanyak 94.

Artinya realisasi kinerja yang bisa dicapai Pemerintah Kota Palopo masih lebih besar, daripada realisasi keuangan. Sebab kinerja sasaran pertama berada pada angka 103.76% sementara realisasi keuangan hanya pada angka 98,06%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo telah mampu melaksanakan efisiensi sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran pembangunan pertama.

Berikut adalah program dan realiasi keuangan pada sasaran pembangunan pertama tahun 2019 :

Tabel 3.3.5
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 1

No	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	215,310,000	162,745,000	75.59%
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	25,031,480.500	24,813,003,415	99,12%
3	Program Pendidikan Non Formal	137,395,000	127,496,964	92.80%
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	540,176,500	506,491,000	93.76%
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	96,030,000	95,674,500	99.63%
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan	13,200,637,000	12,756,837,506	96.64%
7	Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis	7,066,140,000	6,918,904,700	97.92%
8	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	221,732,000	221,062,300	99.70%
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Perpustakaan	901,298,000	888,251,175	98.55%
	Anggaran	47,410,199,000	46,490,466,560	98,06%

Sasaran II : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran kedua sebesar **100.7%** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **100.7%** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran kedua nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran kedua hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.3.6
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Angka harapan hidup (Thn)	70.32	70.79	100.7%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100.7	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN II				100.7	Sangat Tinggi

Sesuai RPJMD Kota Palopo 2018-2023, indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka harapan Hidup yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Indikator ini menggambarkan umur yang panjang dan hidup yang sehat masyarakat (BPS)

Dan sesuai hasil evaluasi capaian kinerja sasaran kedua yang memiliki 1 Indikator Kinerja, angka atau nilai rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 100.70%. Sesuai skala ordinal yang ada, predikat kinerjanya adalah **SANGAT TINGGI**. Berikut adalah hasil pengukuran kinerja indikator sasaran pembangunan daerah kedua Kota Palopo.

Tabel 3.3.7
Pengukuran Kinerja Sasaran 2

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2019	Realisasi 2019			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Angka harapan hidup	70,49	70,32	70,79	100,7	70,40	100,55

Angka atau umur harapan hidup (AHH) di Kota Palopo tahun 2019 sebesar 70.79 Tahun. Ini lebih baik dari angka harapan hidup tahun 2018 yang berada pada angka 70.32 Tahun atau menguat 0.30 Point. Capaian ini juga melebihi target 2019 Kota Palopo yang berada pada angka 70.32 Tahun. Bahkan telah melampaui target akhir AHH di RPJMD Kota Palopo pada tahun 2023.

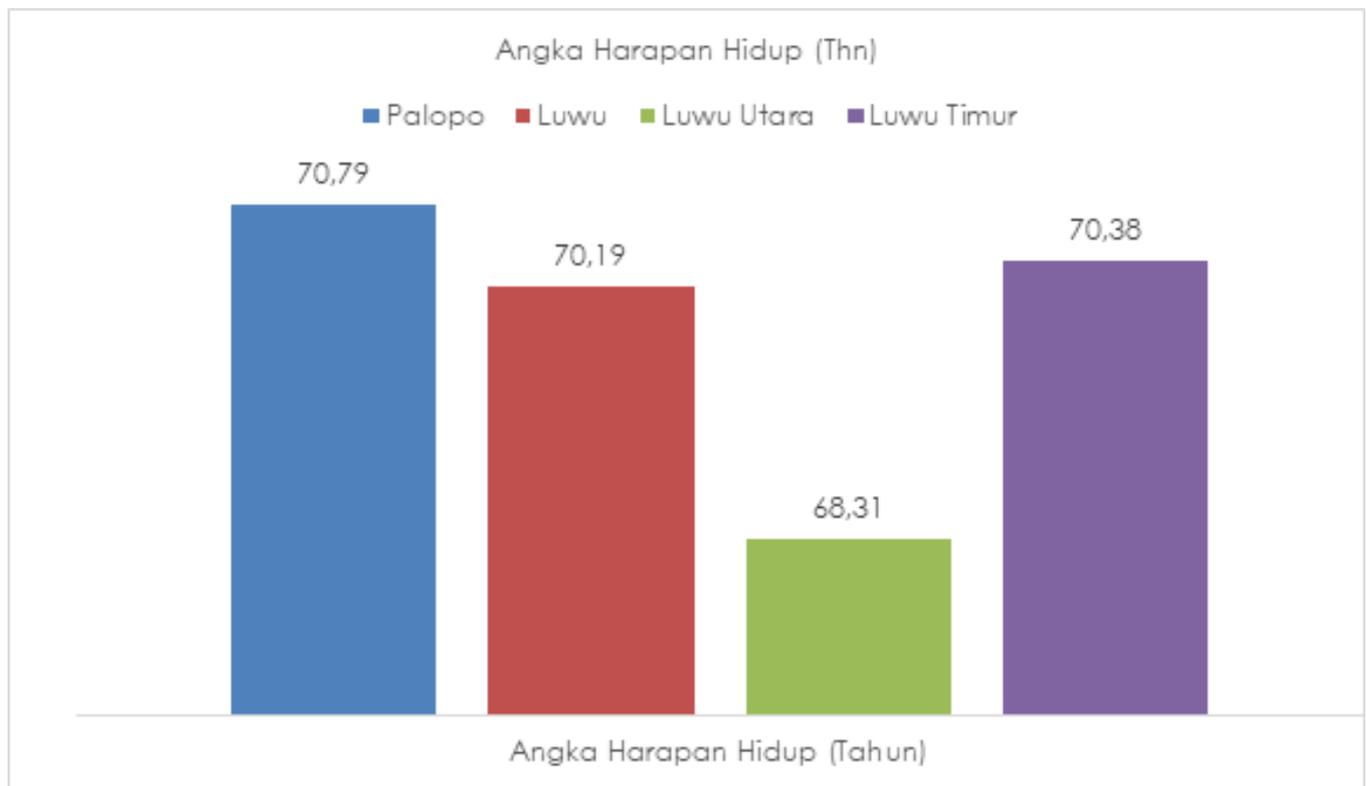
AHH Kota Palopo Tahun 2013 hanya berada pada angka 70.10, kemudian naik menjadi 70.12 (2014), 70.20 di 2015, setahun kemudian menjadi 70.25 (2016), 70.30 pada tahun (2017). Akselerasi atau lompatan tertinggi AHH Kota Palopo terjadi pada tahun 2018 dimana mampu mencapai 70.49 atau meningkat 0.19 point dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, trend peningkatan AHH Kota Palopo hanya meningkat antara 0.02 - 0.08 point.

Jika dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota Lain di Sulawesi Selatan, AHH 2019 Kota Palopo menempati posisi ke enam,

dibawah Kabupaten Toraja Utara (73.35), Tana Toraja (73.15), Kota Makassar (72), Kota Pare-Pare (71.18), Kabupaten Enrekang (70.83). AHH Kota Palopo 2019, juga masih berada diatas rata-rata AHH Sulsel 2019 (70.43 Tahun).

Angka Harapan Hidup Kota Palopo 2019, masih menjadi yang paling tinggi di luwu raya, dimana beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo, memiliki AHH yang masih di bawah capaian Kota Palopo. Kabupaten Luwu berada pada angka 70.19 Tahun, Luwu Timur 70.38 Tahun, Luwu Utara 68.31 Tahun,

Grafik perbandingan angka harapan hidup Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Beberapa faktor utama yang mendukung peningkatan derajat kesehatan yang masyarakat Kota Palopo adalah :

- ❖ Meningkatnya jumlah masyarakat Kota Palopo yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Dimana pada tahun 2019 angkanya berada pada 186.152 Jiwa. (Tahun 2017 hanya sebanyak 182.254 Jiwa). Terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 48.326 jiwa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 79.967 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) dari PNS Daerah dan Pusat 21.904 jiwa, TNI, Polri 3.187 jiwa, PNP 285 jiwa, dan PPU swasta (BUMN/perusahaan) 7.550 jiwa. Selanjutnya dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 16.628 jiwa, dan Bukan Pekerja 8.037 jiwa.
- ❖ Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Kota Palopo menanggung premi kesehatan kepesertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 79.967 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, 2017 sebanyak 66.791 orang dan 2016 sebanyak 62.000 orang.
- ❖ Besaran rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tahun 2019 (33.77%), lebih baik dibandingkan setahun sebelumnya yang hanya 31.44% pada tahun 2018.
- ❖ Angka Kematian Bayi (AKB) **per 1000** kelahiran hidup 2019 sebanyak 1 kasus, menurun dibandingkan tahun 2018 pada angka 2.
- ❖ Angka Kematian Ibu **per 100,000** kelahiran hidup 2019, pada angka 30 kasus, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang berada pada angka 66.

Tabel 3.3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
100.70	95.47

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 218.703.717.310, dengan realisasi Rp. 208.796.388.473 atau **95.47%** **dan mampu menghasilkan kinerja sasaran sebesar 100.70%**. Anggaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk 21 Program dan 66 Kegiatan di Tiga Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan, BLUD RSUD Tipe B Sawerigading, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Artinya realisasi kinerja yang bisa dicapai Pemerintah Kota Palopo masih lebih besar, daripada realisasi keuangan. Sebab kinerja sasaran kedua berada pada angka 100.70%

sementara realisasi keuangan hanya pada angka 95,47%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo telah mampu melaksanakan efisiensi sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran pembangunan kedua.

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran kedua meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 3.3.9
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 2

No	Program	Pagu	Realisasi	% Tingkat Realisasi
1	Program obat dan perbekalan kesehatan	55.450.000	54.101.669	97.57
2	Program upaya kesehatan masyarakat	3.994.682.192	3.683.062.910	92.20
3	Program pengawasan obat dan makanan	125.748.000	122.868.950	97.71
4	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	2.340.035.000	2.340.035.000	100.00
5	Program perbaikan gizi masyarakat	56.000.000	55.535.047	99.17
6	Program pengembangan lingkungan sehat	208.212.000	204.156.250	98.05
7	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	315.329.000	293.731.150	93.15
8	Program standarisasi pelayanan kesehatan	111.000.000	108.600.000	97.84
9	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan jaringannya	1.707.100.000	1.703.969.000	99.82
10	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	22.928.076.000	21.950.193.939	95.74
11	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	51.800.000	50.914.748	98.29

No	Program	Pagu	Realisasi	% Tingkat Realisasi
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	9.050.000	9.035.500	99.84
13	Program peningkatan sarana dan prasarana DAK bidang kesehatan	31.310.835.552	30.519.337.444	97.47
14	Program pelayanan BLUD bidang kesehatan	3.769.350.000	3.367.086.088	89.33
15	Program peningkatan pelayanan kesehatan dana kapitasi JKN	11.293.720.806	8.862.426.659	78.47
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik	8.369.280.000	8.272.365.643	98.84
17	Program peningkatan sarana dan prasarana DAK bidang kesehatan	40.926.588.400	38.483.284.797	94.03
18	Program pelayanan BLUD bidang kesehatan	89.256.830.360	86.846.691.211	97.30
19	Program peningkatan peran serta kepemudaan	713.770.000	713.704.700	99.99
20	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	560.860.000	559.289.768	99.72
21	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	600.000.000	595.998.000	99.33
Jumlah & Realisasi		218.703.717.310	208.796.388.473	95.47

Sasaran III : Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ketiga sebesar **103.6** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **103.6** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran ketiga nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran ketiga hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.3.10
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.1	7.82	103.60%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				103.60	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN III				103.60	Sangat Tinggi

Sesuai RPJMD Kota Palopo 2018-2023, indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat adalah Persentase Penduduk Miskin, yang diharapkan terus menurun dari tahun ke tahun. Sesuai hasil evaluasi capaian kinerja sasaran ketiga yang memiliki 1 Indikator Kinerja, angka atau nilai rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar **103.6%**. Sesuai skala ordinal yang ada, predikat kinerjanya adalah **SANGAT TINGGI**. Berikut adalah hasil pengukuran kinerja indikator sasaran pembangunan daerah ketiga, Kota Palopo.

Tabel 3.3.11
Pengukuran kinerja sasaran 3

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2019	Realisasi 2019			
Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S.3)	Persentase Penduduk Miskin	7,94	8,1	7,82	103,6	6,08	77,75

Persentase penduduk miskin di Kota Palopo tahun 2019 sebesar 7.82 %. Kondisi ini lebih baik dari kondisi tahun 2018 dimana persentase penduduk miskin masih mencapai angka 7.94%. Artinya pemerintah kota Palopo mampu menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0.12%. Capaian ini juga berada diatas target persentase penduduk miskin

2019 Kota Palopo, yang berada pada angka 8.1%. Bila dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD, sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Kota Palopo baru mampu mewujudkan 77.75% target RPJMD, untuk indikator persentase penduduk miskin.

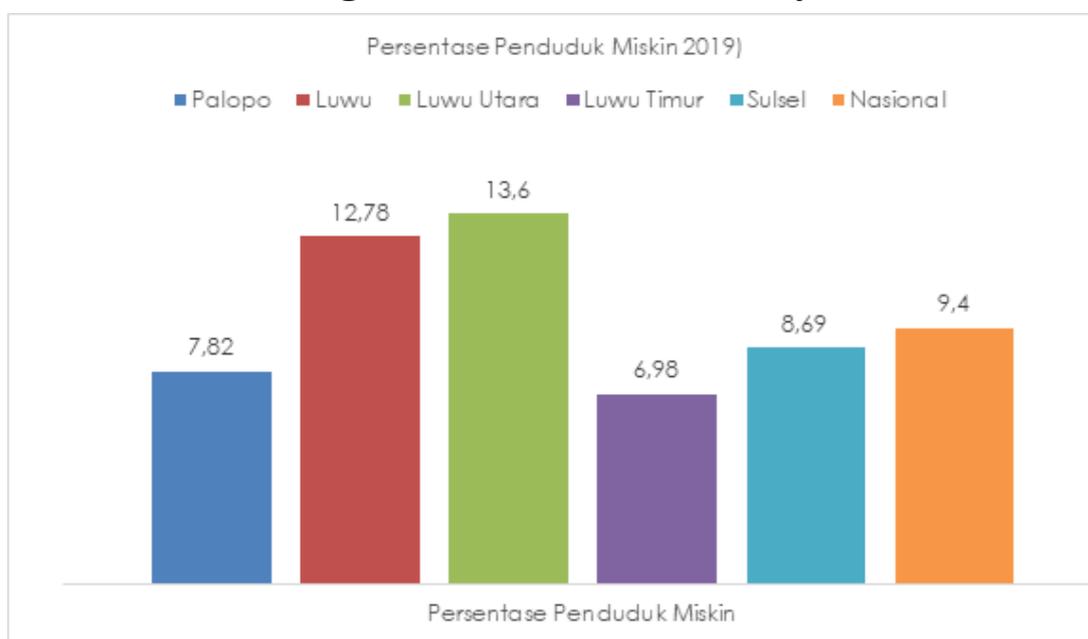
Jika dibandingkan sejak tahun 2013, persentase penduduk miskin Kota Palopo telah jauh menurun. Tahun 2013, persentase penduduk miskin sebesar 9.57% menjadi 7.82% di tahun 2019. Meski dalam prosesnya, angka penurunan ini fluktuatif. Tahun 2014 pada angka 8.8%, 2015 pada angka 8.58%, 2016 pada angka 8.74%, 2017 pada angka 8.78%, 2018 pada angka 7.94%.

Dibandingkan dengan 24 kabupaten/ kota Lain di Sulawesi Selatan, Persentase Penduduk Miskin 2019 Kota Palopo **masih lebih baik** daripada Kabupaten Luwu Utara (13.6%) dan Kabupaten Luwu (12.78%). Bahkan lebih baik dari rata-rata persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan 2019 (8.69%) dan nasional (9.4%).

Meski demikian, capaian Pemerintah Kota Palopo ini masih dibawah capaian persentase penduduk miskin Kota Pare-Pare 2019 (5.26%), Kota Makassar (4.28%), bahkan Kabupaten Luwu Timur yang 2019 hanya memiliki 6.98% penduduk miskin.

Namun dari sisi **jumlah**, Kota Palopo adalah wilayah di Luwu Raya dengan jumlah penduduk miskin **paling sedikit**. Tahun 2019 Kota Palopo hanya memiliki penduduk miskin sebanyak 14.370 jiwa. Sementara Kabupaten Luwu (46.180 Jiwa), Luwu Utara (42.480 Jiwa), Luwu Timur (20.830 Jiwa). Bahkan dengan Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk miskin jauh diatas Kota Palopo, yakni sebanyak 65.120 Jiwa. Di Sulawesi Selatan, hanya Kota Pare-Pare yang memiliki penduduk miskin paling kecil (7620 Jiwa) disusul Kota Palopo (14.370 Jiwa).

Grafik perbandingan persentase penduduk miskin Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Beberapa faktor yang mendukung pengurangan persentase penduduk miskin di Kota Palopo adalah :

- Jumlah Keluarga Prasejahtera di Kota Palopo Tahun 2019 sebanyak 2.889 KK, jumlah ini lebih sedikit (lebih baik) daripada tahun 2018, dimana jumlah keluarga prasejahtera berada pada angka 2924 KK. Atau menurun sebanyak 35 KK.
- Penanganan Kemiskinan di Kota Palopo dilakukan secara terpadu dan sinergi, dengan tidak menjadikan satu perangkat daerah saja sebagai *solution maker* penanganan kemiskinan. Pada tahun 2019, 12 Perangkat daerah, program dan kegiatannya diarahkan untuk menurunkan angka atau besaran penduduk miskin di Kota Palopo.
- Menjadikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai target sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.
- Memastikan masyarakat miskin memiliki akses pada pangan dan kesehatan, bahkan terus berkembang pada layanan sesuai standar pelayanan minimal bidang pendidikan, perumahan, serta social. Salah satunya adalah pembuatan rumah pangan yang menyediakan Sembilan bahan pokok, sesuai harga pada tingkat distributor, yang pengelolaannya dilakukan Dinas Perdagangan Kota Palopo.
- Strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan pada beberapa aspek yakni meringankan beban pengeluaran penduduk miskin, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan mengembangkan keberdayaan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.
- Penanganan sasaran penanganan kemiskinan diarahkan pada skala perorangan, skala rumah tangga, skala komunitas dan skala usaha dan ekonomi masyarakat miskin.
- Beberapa proyek strategis penanganan kemiskinan di Kota Palopo adalah bantuan rastra daerah, (tidak termasuk rastra dari APBN), bantuan pembayaran premi kesehatan per jiwa penduduk miskin (diluar Program Penerima Bantuan Iuran APBN), bantuan bedah rumah untuk keluarga/rumah tangga miskin, penanganan kawasan kumuh dimana komunitas masyarakat miskin menetap, dan pemberdayaan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin, dsb.
- Penanganan kemiskinan juga diarahkan dengan upaya pengendalian penduduk melalui program KB keluarga miskin, pembinaan keluarga dan pengarusutamaan gender dengan sasaran masyarakat miskin, dsb.
- Mengalokasikan dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan di 12 Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penanganan kemiskinan.

Tabel 3.3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
103.60	88.82

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 45,668,089,876,- yang dikelola oleh 12 Perangkat Daerah (59 Program) dengan realisasi sebesar Rp 40,580,936,807,- atau 88.82%

Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran yang berpredikat sangat berhasil (103.60%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya. (Kinerja sasaran lebih besar daripada kinerja keuangan)

Berikut adalah table program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran ketiga meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 3.3.13
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 3

No.	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	149,156,000	143,743,000	96.37
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6,055,360,500	6,052,913,600	99.96
3	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	107,155,000	107,155,000	100.00
4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	142,053,000	129,542,000	91.19
5	Program Pengembangan Perumahan	903,515,500	418,215,899	46.29
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	148,380,000	140,000,700	94.35
7	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	50,650,000	50,650,000	100.00

No.	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	188,429,200	185,715,331	98.56
9	Program Keluarga Berencana	138,500,000	66,423,000	47.96
10	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	10,200,000	10,200,000	100.00
11	Program pelayanan kontrasepsi	23,600,000	20,000,000	84.75
12	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1,699,300,000	1,694,414,500	99.71
13	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	6,800,000	6,800,000	100.00
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana	3,467,237,000	2,344,996,682	67.63
15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	27,806,000	25,621,100	92.14
16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	272,253,380	259,122,080	95.18
17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	35,144,200	31,957,100	90.93
18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	600,000,000	588,408,000	98.07
19	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	24,100,000	24,090,000	99.96
20	Program pengembangan budidaya perikanan	185,115,000	181,911,900	98.27
21	Program pengembangan perikanan tangkap	454,509,000	453,661,370	99.81
22	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	123,666,950	123,568,820	99.92

No.	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
23	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Air Tawar	29,300,000	29,275,000	99.91
24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1,558,019,000	1,534,477,000	98.49
25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	192,558,500	189,444,500	98.38
26	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	5,600,000	5,593,000	99.88
27	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	292,255,000	290,882,500	99.53
28	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	193,690,000	193,079,754	99.68
29	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	175,000,000	174,900,434	99.94
30	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	324,420,000	257,978,798	79.52
31	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	668,020,400	666,973,140	99.84
32	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	182,460,000	182,412,615	99.97
33	Program peningkatan produksi hasil peternakan	2,185,468,146	2,161,172,571	98.89
34	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	58,500,000	58,490,106	99.98
35	Program peningkatan produksi peternakan	56,220,000	56,220,000	100.00
36	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian	2,702,208,000	513,244,596	18.99
37	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	254,540,000	254,068,500	99.81

No.	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
38	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1,648,164,550	1,618,513,732	98.20
39	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,130,600,000	2,130,750,000	100.01
40	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1,443,700,000	510,200,000	35.34
41	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	315,260,000	315,260,000	100.00
42	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	6,771,730,000	6,749,929,058	99.68
43	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	64,680,000	61,831,000	95.60
44	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	360,664,000	355,745,100	98.64
45	Program Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian	200,619,000	191,654,450	95.53
46	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	7,103,183,500	7,065,682,140	99.47
47	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	27,134,000	27,133,000	100.00
48	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	216,092,800	215,563,300	99.75
49	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	58,468,550	58,468,550	100.00

No.	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
50	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	487,166,400	487,166,400	100.00
51	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	35,880,000	35,880,000	100.00
52	Program perencanaan pembangunan ekonomi	153,512,500	152,274,381	99.19
53	Program perencanaan sosial dan budaya	248,964,800	246,511,600	99.01
54	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	419,740,000	419,735,000	100.00
55	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	103,520,000	103,520,000	100.00
56	Program pengembangan wawasan kebangsaan	103,820,000	103,820,000	100.00
57	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	56,780,000	56,756,500	99.96
58	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	39,340,000	39,340,000	100.00
59	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	7,880,000	7,880,000	100.00
Realisasi Kinerja Keuangan		45,688,089,876	40,580,936,807	88.82

Sasaran IV : Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)

Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan di Kota Palopo 2019 ditandai dengan menurunnya persentase luas kawasan kumuh. Jika tahun 2018 berada pada angka 20.85 Ha (0.82%), pada tahun 2019, luas kawasan kumuh menurun menjadi 3.85 Ha atau (0.15%). Ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran IV, berada pada angka 99.85% dari target 2019.

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran keempat sebesar 99.85 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 99.85 atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran keempat nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran keempat hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.3.14
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0	0.15	99.85	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				99.85	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN III				99.85	Sangat Tinggi

Untuk mengetahui posisi kinerja 2019 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.15
Pengukuran Kinerja Sasaran 4

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2019	Realisasi 2019			
Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase areal kawasan kumuh	0,82	0	0,15	99,85	0	99,85

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian 2019 baru memenuhi 99.85% target akhir RPJMD 2023. Kinerja penanganan kawasan kumuh di Kota Palopo digambarkan sebagai berikut :

- Tahun 2014 sesuai SK Walikota luas kumuh Kota Palopo yaitu 89.33 Ha.
- Tahun 2018, luas kawasan kumuh di Kota Palopo menurun menjadi 20,85 Ha.
- Tahun 2019 luas kawasan kumuh tersisa 3.85 Ha

Beberapa aspek yang menguatkan kinerja penanganan kawasan kumuh di Kota Palopo adalah :

- Penanganan kawasan kumuh di Kota Palopo dilaksanakan secara bersinergi pada beberapa perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melaksanakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perumahan pemukiman
- Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana ke PU-an skala lingkungan dan kawasan
- Dinas Ketahanan Pangan mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan lingkungan yang selain bebas kumuh namun juga produktif
- Dinas Lingkungan Hidup menangani kebersihan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tetap bersih
- Pelaksanaan Program dan Pendampingan Kotaku di sejumlah kelurahan di Kota Palopo
- Perencanaan penanganan kawasan kumuh dilaksanakan berbasis masyarakat secara partisipatif.
- Kuatnya dukungan pemerintah Kota Palopo melalui serangkaian program termasuk New Site Development (NUSP) dan relokasi masyarakat yang selama ini menetap di kawasan kumuh.

Tabel 3.3.16

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
99,85	91,90

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 121,148,490,400,- yang dikelola oleh 5 Perangkat Daerah (23 Program) dengan realisasi sebesar Rp 111,334,918,271,- atau 91,90%

Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran yang berpredikat sangat tinggi (99,85%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya. (Kinerja sasaran lebih besar daripada kinerja keuangan)

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran keempat meningkatkan kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan.

Tabel 3.3.17
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 4

Program	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
Program Pengembangan Perumahan	903,515,500	418,215,899	46.29
Program Lingkungan Sehat Perumahan	148,380,000	140,000,700	94.35
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	50,650,000	50,650,000	100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	188,429,200	185,715,331	98.56
Program pembangunan jalan dan jembatan	48,274,974,806	44,502,231,394	92.18
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5,095,706,590	5,086,716,540	99.82
Program pembangunan turap/talud/bronjong	2,787,395,000	2,643,783,500	94.85
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	427,300,000	397,534,225	93.03
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	84,880,000	84,878,756	100.00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	100,000,000	99,915,000	99.92
Program Pengendalian Banjir	468,048,020	374,705,000	80.06
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8,542,450,000	6,470,101,100	75.74

Program	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	16,541,321,500	16,246,187,547	98.22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	10,028,400,720	8,422,664,780	83.99
Program Perencanaan Tata Ruang	107,500,000	74,100,265	68.93
Program Pemanfaatan Ruang	709,000,000	287,943,514	40.61
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	58,100,000	55,595,075	95.69
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	41,450,000	40,938,700	98.77
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11,603,168,864	11,531,395,470	99.38
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	162,875,000	151,591,950	93.07
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3,366,843,400	3,350,648,100	99.52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup	704,424,000	306,750,000	43.55
Program peningkatan sarana dan prasarana bidang penerangan jalan umum	10,753,677,800	10,412,655,425	96.83
Rata-Rata Realisasi Keuangan	121,148,490,400	111,334,918,271	91.90

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 111,33 Milyar dengan tingkat realisasi sebanyak 91.90%. Kinerja yang mampu direalisasi pada sasaran ini mencapai 99.85%. Artinya realisasi kinerja yang dihasilkan masih lebih besar dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dipakai, sehingga Pemerintah Kota Palopo mampu melaksanakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang digunakan.

Sasaran V : Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran kelima sebesar **112** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **112** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran kelima nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran kelima hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.3.18
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan 5

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	11.02	12.30	112	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				112	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN V				112	Sangat Tinggi

Tabel 3.3.18 diketahui capaian kinerja sasaran pembangunan daerah ke 5 yaitu 112 %. Dimana indikator kinerja sasarannya adalah persentase layanan angkutan darat, target tahun 2019 adalah sebesar 11,02 sedangkan realisasi hingga akhir tahun 2019 adalah sebesar 12,3. Ini berarti bahwa capaian kinerja tahun 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan sehingga predikat capaian adalah **Sangat Tinggi**

Untuk mengetahui posisi kinerja 2019 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.19
Pengukuran kinerja sasaran 5

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2018	Realisasi 2019			
Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Persentase layanan angkutan darat (per 1000)	9,9	11,02	12,30	112	12,86	95,65

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2019 baru memenuhi 95,65% target akhir RPJMD 2023. Namun Pemerintah Kota Palopo sangat optimis mampu melampaui target yang telah di tetapkan di RPJMD pada akhir tahun 2023 nanti. Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 12,3 merupakan lonjakan yang cukup besar dibandingkan capaian tahun 2018 yang hanya pada poin 9,9. Tetapi tentunya capaian ini akan terus ditingkatkan di masa – masa yang akan datang.

Sasaran pembangunan daerah yang ke 5 ini dikontribusi oleh capaian indikator persentase layanan angkutan darat (per 10.000). Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah armada terhadap jumlah penumpang per 1000 orang. Berdasarkan analisis melalui data Dinas Perhubungan yang ada, didapatkan angka 12,3 atau lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2019. Oleh karena itu, tingkat capaian 2019 mencapai 112%, atau 95,65% jika dibandingkan dengan target RPJMD 2023.

Jenis Armada Tahun 2019	Jumlah Armada	Jumlah Penumpang
Bus besar	7.100	120.700
Bus sedang	5.000	60.000
Bus kecil	227.995	1.823.960
Angkot	17.894	89.470
Total	250.889	1.973.430

Tabel 3.3.20
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
112	91,73

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 74.348.903.556,- yang dikelola oleh 3 Perangkat Daerah (8 Program) dengan realisasi sebesar Rp 68.201.710.216,- atau 91,73%

Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran yang berpredikat sangat tinggi (112%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya atau dengan kata lain kinerja sasaran lebih besar daripada kinerja keuangan

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang kelima yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah.

Tabel 3.3.21
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 5

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program pembangunan jalan dan jembatan	48,274,974,806	44,502,231,394	92.18
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	427,300,000	397,534,225	93.03
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8,542,450,000	6,470,101,100	75.74
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	14,752,170,500	14,482,672,547	98.17
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	37,135,000	37,134,900	100.00
Program peningkatan pelayanan angkutan	1,463,972,000	1,463,657,500	99.98
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	49,999,000	49,992,000	99.99
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	800,902,250	798,386,550	99.69
Rata-Rata Realisasi Keuangan	74,348,903,556	68,201,710,216	91.73

Sasaran VI : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran keenam sebesar 122.58 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 122.58 atau memiliki predikat Sangat Tinggi. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran ketujuh nilai capaian sasaran diolah menggunakan metode rata-rata data kelompok, sebab sasaran keenam memiliki 2 IKU dengan predikat kinerja yang keduanya sangat berhasil.

Tabel 3.3.22
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah 6

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	18	12.38	145	Sangat Tinggi
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.83	76.95	100.16	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				122.58	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN VI				122.58	Sangat Tinggi

Sasaran ini memiliki dua indikator, yakni luas kawasan terdampak banjir dan persentase luas ruang terbuka hijau. Luas kawasan terdampak banjir didapatkan berdasarkan riwayat kejadian banjir di Kota Palopo selama tahun 2019. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, didapatkan beberapa kejadian banjir di 5 kelurahan di Kota Palopo yang tersebar di 9 RT dan 6 RW. Total areal yang terdampak banjir adalah 12,38 ha. Capaian ini melampaui target 2019 yang menargetkan 18 ha areal terdampak banjir.

Sementara itu, indikator kedua adalah persentase luas ruang terbuka hijau. Target Nilai Indikator Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2019 adalah sebesar 76,83 dan terealisasi sebesar 76,95 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,16%. Pencapaian yang melampaui target pada tahun 2019, adalah merupakan upaya dan bentuk komitmen pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan Palopo sebagai kota yang hijau. Bentuk dan dukungan Kuat Walikota dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran di TA 2019, baik untuk penambahan luasan RTH berupa pembangunan taman.

Untuk mengetahui posisi kinerja 2019 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.23
Pengukuran kinerja sasaran 6

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2019	Realisasi 2019			
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir	20,47	18	12,38	145	2	43,80
	Persentase luas ruang terbuka hijau	76,72	76,83	76,95	100,16	77,2	99,68

Dari tabel 3.3.23 diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2019 untuk indikator Luas kawasan terdampak banjir adalah 12,38. Capaian ini jauh diatas target tahun 2019 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 18 Ha. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 yang hanya pada 20,47 Ha. Namun jika di dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian ini masih on progress mengkontribusi sebesar 43,80%.

Untuk indikator yang kedua yaitu persentase luas ruang terbuka hijau realisasi kinerja tahun 2019 yaitu 76,95. Capaian ini sedikit diatas target tahun 2019 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 76,83 Ha sehingga capaian kinerjanya adalah 100,16 %. Namun jika di dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian ini masih sedikit di bawa target akhir yaitu 77,2 Ha atau sekitar 99,68% dari target akhir RPJMD. Pencapaian yang melampaui target pada tahun 2019 adalah merupakan upaya dan bentuk komitmen pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan Palopo sebagai kota hijau. Bentuk dan dukungan kuat Walikota dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran di tahun anggaran 2019 untuk penambahan luasan RTH berupa pembangunan taman

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara belum sesuai karena adanya kendala proses pembebasan lahan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau yang belum dapat direalisasikan
2. Belum semua RTH yang berfungsi optimal karena:
 - a. Status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota;
 - b. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam merawat dan memelihara RTH yang disediakan oleh pemerintah.

Sementara upaya tindak lanjut yang dilakukan yakni, Perlunya penyusunan strategi yakni:

- a. Penentuan prioritas jenis RTH yang perlu dibangun serta lokasi berdasarkan analisa kebutuhan;
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Kantor ATR BPN dalam rangka upaya percepatan pembebasan lahan, mengingat target penambahan RTH dibangun dan dipelihara ;
- c. Melakukan analisa permasalahan secara rutin untuk target lokasi dan luasan yang seharusnya dioptimalkan namun belum tercapai, sehingga dapat diketahui akar permasalahan serta upaya yang perlu segera dilakukan.

Tabel 3.3.24

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6 dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
122,58	97,29

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 10.563.185.610,- yang dikelola oleh 3 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 9 Program dengan realisasi sebesar Rp 10.276.406.115 atau 97,29%

Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran yang berpredikat sangat tinggi (122,58%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya atau dengan kata lain kinerja sasaran lebih besar daripada kinerja keuangan

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang keenam yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.3.25

Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 6

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5,095,706,590	5,086,716,540	99.82
Program pembangunan turap/ta-lud/bronjong	2,787,395,000	2,643,783,500	94.85
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	100,000,000	99,915,000	99.92
Program Pengendalian Banjir	468,048,020	374,705,000	80.06

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	1,789,151,000	1,763,515,000	98.57
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	58,100,000	55,595,075	95.69
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	190,285,000	185,116,800	97.28
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	38,400,000	30,969,200	80.65
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup	36,100,000	36,090,000	99.97
Rata-Rata Realisasi Keuangan	10.563.185.610	10.276.406.115	97,29

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 10,27 Milyar dengan tingkat realisasi sebanyak 97.29%. Kinerja yang mampu direalisasi pada sasaran ini mencapai 122.58 %. Artinya realisasi kinerja yang dihasilkan masih lebih besar dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dipakai, sehingga Pemerintah Kota Palopo mampu melaksanakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang digunakan.

Sasaran VII : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ketujuh sebesar **87.45** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **87.45** atau memiliki predikat **Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran ketujuh nilai capaian sasaran diolah menggunakan metode rata-rata data kelompok.

Tabel 3.3.26
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah 7

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah (Nilai)	70	52.43	74.90	Sedang
	Level SPIP Daerah (Point)	3	3	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				87.45	Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN VII				87.45	Tinggi

Dari hasil evaluasi capaian Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada tahun 2019 meningkat menjadi 52.43 dari 50.12 pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 4.61%. Demikian halnya dengan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 memperoleh level 3 (terdefinisi), meningkat dari 2.84 pada tahun 2018. Dengan demikian level SPIP Daerah Kota Palopo telah mencapai target.

Dari tabel 3.3.26 diatas dapat diketahui bahwa nilai capaian sasaran 7 adalah 87,45 dengan predikat tinggi yang merupakan nilai rata – rata capaian kinerja sasaran 7 yang di ambil dari tingkat capaian kinerja tiap indikator kinerja. Untuk mengetahui posisi kinerja 2019 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.3.27
Pengukuran kinerja sasaran 7

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2018	Realisasi 2019			
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah	50,02	70	52,43	74,90	85	61,7
	Level SPIP daerah	2,84	3	3	100	3	100

Dari tabel 3.3.27 diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2019 untuk indikator nilai akuntabilitas pemerintahan daerah adalah 52,43. Capaian ini jauh dibawah target tahun 2019 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 70. Namun Capaian ini lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 yang hanya pada 50,02. Jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian ini masih berkontribusi sebesar 61,7%.

Untuk indikator yang kedua yaitu level SPIP realisasi kinerja tahun 2019 yaitu 3. Capaian ini telah mencapai target tahun 2019 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu nilai 3, sehingga capaian kerjanya adalah 100% dan capaian ini juga telah mencapai target tahun terakhir RPJMD.

Tabel 3.3.28
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 7 dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
87,45	93,33

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 13.508.140.740,- yang dikelola oleh 5 Perangkat Daerah yaitu Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Dinas Persandian dan Statistik dan BKPSDM melalui 10 Program dengan realisasi sebesar Rp 12.607.169.956 atau 93,33%.

Melihat tabel 3.3.28 diketahui bahwa capaian kinerja sasaran 7 belum optimal walaupun telah disertai dengan penganggaran yang cukup. Namun di tahun – tahun mendatang Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palopo.

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.3.29
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 7

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program pengembangan data/ informasi	25,028,400	25,028,400	100.00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	35,880,000	35,880,000	100.00
Program perencanaan pembangunan daerah	818,517,940	809,055,381	98.84
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5,873,116,000	5,570,019,510	94.84
Program pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	1,240,481,000	1,239,021,108	99.88
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,564,230,000	2,108,086,500	82.21

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	564,856,900	542,389,757	96.02
Program Pendidikan Kedinasan	1,209,733,000	1,129,332,000	93.35
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1,105,197,500	1,077,290,800	97.47
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	71,100,000	71,066,500	99.95
Rata-Rata Realisasi Keuangan	13,508,140,740	12,607,169,956	93.33

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 12,60 Milyar dengan tingkat realisasi sebanyak 93.33%. Kinerja yang mampu direalisasi pada sasaran ini mencapai 87.45 %. Artinya realisasi kinerja yang dihasilkan masih lebih kecil dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dipakai, sehingga Pemerintah Kota Palopo belum mampu melaksanakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang digunakan.

Sasaran VIII : Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran delapan sebesar **102.85** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **102.85** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran kedelapan nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran.

Tabel 3.3.30
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah 8

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	80.78	83.08	102.85	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN IKU				102.85	Sangat Berhasil
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN VIII				102.85	Sangat Berhasil

Sesuai RPJMD Kota Palopo 2018-2023, Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan publik yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 meningkat menjadi 83.08 dari 81.81 dari Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 atau meningkat sebesar 1.94%. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga pendidikan.

Berikut adalah beberapa hasil survey indeks kepuasan masyarakat Tahun 2019 :

Tabel 3.3.31
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI INDEKS	IKM	KINERJA UNIT LAYANAN	MUTU PELAYANAN
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,44	85,91	Baik	B
2	RSUD Sawerigading	3,31	82,83	Baik	B
3	Puskesmas Wara	3,29	82,27	Baik	B
4	Dinas Sosial (Rastra APBN & APBD)	3,30	82,51	Baik	B
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,33	81,18	Baik	B
6	Kecamatan Wara	3,35	83,77	Baik	B
Rata-rata			83,08	Baik	B

Berikut adalah beberapa inovasi layanan publik yang dilaksanakan pemerintah Kota Palopo tahun 2019 :

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
1	BANUA MERAH 	Singkatan dari Bantuan Anak Meraih Harapan. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo. KIPP (Sinovik) TOP 30 SUL-SEL 2019
2	AIR DISUNTIK RESAH PUN TEROBATI 	Layanan Air Bersih Bagi Masyarakat menggunakan Tanki jika mengalami kesulitan air dari jaringan PDAM. Dilaksanakan oleh PDAM Kota Palopo. KIPP (Sinovik) TOP 99 Indonesia 2017, dan sampai hari ini terus dikembangkan layanannya
3	“SI CAKEP” 	Dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan ini merupakan sistem jemput bola, terkait pembuatan akta kelahiran atas bayi yang baru lahir. Aparatur Disduk Capil akan langsung mendatangi ibu dan bayinya di rumah sakit untuk membuatkan Kartu Identitas Penduduk, misalnya akte kelahiran. Sehingga ketika keluar dari perawatan Rumah Sakit, sang bayi langsung sudah memiliki akta kelahiran.

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
4	<p>SIMPONI CERIA</p> 	<p>Adalah singkatan dari “Sistem Pendaftaran Online, Cepat, Ringkas dan Akurat”. Pasien yang bermaksud mendapatkan pelayanan di RSUD baik pasien poliklinik, BPJS maupun regular, dimudahkan untuk mendaftar melalui aplikasi Whats Up dengan menggunakan Nama, NIK sesuai KTP. Inovasi layanan ini dilaksanakan untuk mengurangi jadwal tunggu yang ada di RSUD dan memberikan kepastian waktu pelayanan kesehatan terhadap pasien.</p>
5	<p>“GO RIDE”</p> 	<p>Adalah Gerakan Optimalisasi Geriatri Terpadu dan Efektif. Layanan ini dikhususkan bagi para lanjut usia yang membutuhkan layanan kesehatan. Mengingat kemampuan fisik pasien lansia yang umumnya sudah sangat terbatas, dokterlah yang akan mendatangi pasien di poli sesuai dengan keluhan kesehatannya. Pelaksana layanan ini adalah RSUD Sawerigading.</p>
6	<p>SIPAKAINGA</p> 	<p>Sistem Paket Layanan Pasien Paru Terintegrasi. Layanan kesehatan ini khusus bagi penderita paru yang dilaksanakan secara terintegrasi. Ini diluncurkan dalam rangka memberikan “keamanan” bagi pasien lain di RSUD, terhadap keberadaan pasien dengan gangguan kesehatan yang bersifat infeksius. Olehnya pasien dengan gangguan kesehatan infeksius pelayanannya akan dipisah dengan pasien lain, termasuk dalam hal pengambilan obat. Pelaksana layanan ini adalah RSUD Sawerigading.</p>
7	<p>“BUGAR”</p> 	<p>Adalah singkatan dari “Budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo</p>
8	<p>“BU KB”</p> 	<p>Adalah singkatan dari “Bukan Kader Biasa”. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo</p>
9	<p>JEMPUT-ANTAR (JA)</p> 	<p>Dilaksanakan oleh UPTD Kesehatan Adalah sebuah layanan kesehatan berbasis mobile yang pelayannya</p>
10	<p>“SI MUD”</p> 	<p>Sistem yang Memudahkan yang dipraktekan oleh Kecamatan Bara</p>

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
11	“SI ANTAR” 	Diinisiasi oleh Kelurahan Amassangan. Dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan public yang menjadi kewenangan kelurahan
12	MABASSA 	Layanan Perizinan “Mudah, Akuntabel, Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik dan Aman” oleh DPMPTSP.
13	FOUR IN ONE 	Pelaksanaan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pelayanan administrasi penduduk
14	“INI KAWAN” 	Pelaksana Oleh Inspektorat Daerah Kota Palopo. Adalah sinonim dari “Klinik Konsultasi Pengawasan”
15	JEMPUT-ANTAR, LAYANAN WEEKEND & TOL INFO 	Oleh DPMPTSP. Fokus Layanan adalah memberikan pelayanan jemput-antar berkas pengurusan perizinan
16	LORONG TAMAN SURG 	Oleh Puskesmas Kelurahan Pontap dalam menjaga kesehatan masyarakat

Untuk mengetahui posisi kinerja 2019 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.32
Pengukuran kinerja sasaran 8

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2018	Realisasi 2019			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	IKM atas pelayanan publik	81,81	80,78	83,40	102,85	82,03	101,16

Dari tabel 3.3.32 diatas diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 adalah 83,40, indeks ini menguat 1,59 poin dibandingkan tahun 2018 yang hanya pada poin 81,81. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka capaian tahun 2019 ini telah mencapai 101,16 % dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.3.33
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 8 dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
102,85	96,00

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 109.827.170.052,- melalui 10 Program dengan realisasi sebesar Rp 105.437.577.120 atau 96%.

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 105.43 Milyar dengan tingkat realisasi sebanyak 96%. Kinerja yang mampu direalisasi pada sasaran ini mencapai 102.85 %. Artinya realisasi kinerja yang dihasilkan masih lebih besar dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dipakai, sehingga Pemerintah Kota Palopo mampu melaksanakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.3.34
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 8

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Penataan Administrasi Kependudukan	228,700,000	214,300,000	93.70
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3,994,682,192	3,683,062,910	92.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	56,000,000	55,535,047	99.17
Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	3,769,350,000	3,367,086,088	89.33
Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	1,291,800,000	1,248,992,000	96.69
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1,699,300,000	1,694,414,500	99.71
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5,434,155,000	5,431,748,500	99.96
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,564,230,000	2,108,086,500	82.21
Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	89,256,830,360	86,846,691,211	97.30
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1,532,122,500	787,660,364	51.41
Rata-rata Realisasi	109,827,170,052	105,437,577,120	96.00

Sasaran IX : Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ke sembilan sebesar **95.1** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **95.1** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran kesembilan, nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran kesembilan hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.3.35
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 9

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.81	10.32	95.10%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				95.10	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN IX				95.10	Sangat Tinggi

Sesuai RPJMD Kota Palopo 2018-2023, Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan perluasan kesempatan berusaha di Kota Palopo adalah menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sesuai hasil evaluasi capaian kinerja sasaran sembilan yang memiliki 1 Indikator Kinerja, angka atau nilai rata-rata capaian kinerja sasaran ini terhadap target daerah sebesar 95.1 %. Sesuai skala ordinal yang ada, predikat kinerjanya adalah SANGAT TINGGI. Artinya pada tahun 2019, Pemerintah Kota Palopo mampu menurunkan angka pengangguran terbuka dibandingkan kondisi tahun 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo lebih baik daripada tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar (10.39%).

Berikut adalah hasil pengukuran kinerja indikator sasaran pembangunan daerah ke Sembilan Kota Palopo.

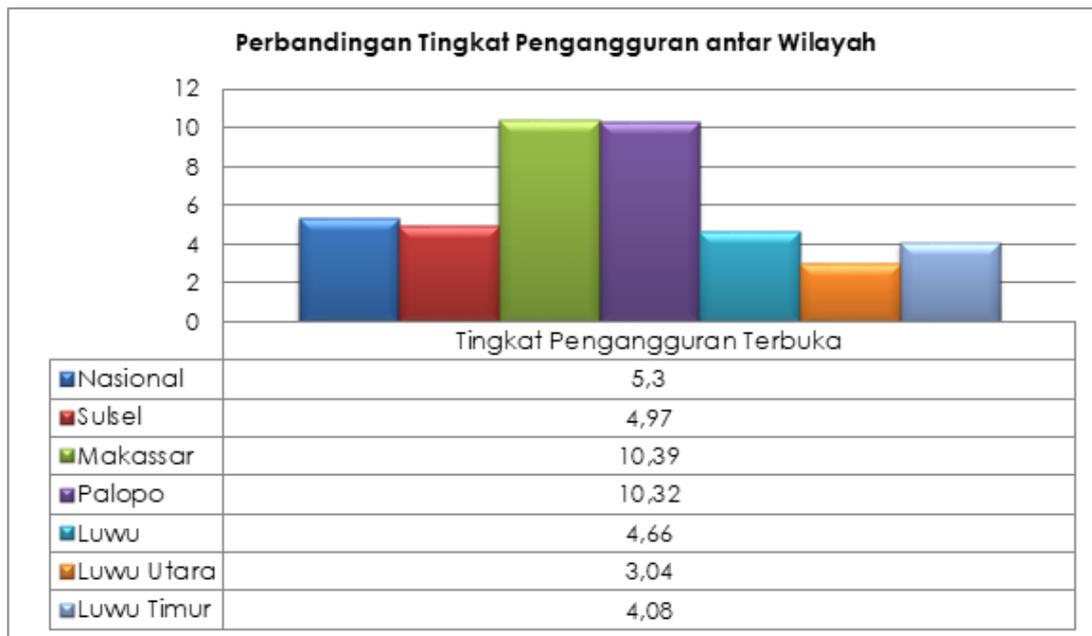
Tabel 3.3.36
Pengukuran Kinerja Sasaran 9

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2018	Realisasi 2019			
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	11.6	9.81	10.32	95.1	8.07	78.2

Meski demikian, Angka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 pun **belum memenuhi target Kota Palopo 2019 (9.81 %)**. Bahkan jika dikomparasikan dengan

daerah/kota Lain di Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo belum lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka beberapa kabupaten yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Kota Palopo, yakni Kabupaten Luwu (4.66%), Kabupaten Luwu Utara (3.04%) dan Kabupaten Luwu Timur (4.08%), bahkan belum lebih baik daripada -rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 2019 (5.3%) Rata-Rata Sulsel (4.97%), Kota Pare-Pare (6.42%).

Grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Angka Tingkat Pengangguran Terbuka 10,32 persen itu setara dengan 8.314 orang menganggur, dari jumlah angkatan kerja di Palopo sebesar 80.564 jiwa. Jumlah pengangguran terbanyak disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari 25.803 orang angkatan kerja, 2.538 orang menganggur, atau hanya 23.265 orang bekerja.

Pengangguran terbanyak kedua disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK). Dari 8.977 orang angkatan kerja, 7.064 orang sudah bekerja, dan 1.913 orang tidak bekerja, atau tercatat sebagai pengangguran terbuka.

Kemudian menyusul lulusan universitas. Dari 19.706 jiwa angkatan kerja, hanya 17.884 orang bekerja. Sebanyak 1.822 orang tercatat masih menganggur. Sementara penyumbang terbanyak keempat adalah orang yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum/tamat sekolah dasar (SD) sebesar 1.257 orang tidak memiliki pekerjaan. Sementara 13.045 orang tercatat sudah bekerja, dari total angkatan kerja 14.302 orang.

Kemudian lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari 8.613 orang angkatan kerja, 7.915 orang tercatat sudah bekerja, dan sisanya 698 orang, masih menganggur. Sedangkan lulusan diploma I/II/III/Akademi, hanya 86 orang yang menganggur, dari total 3.163 orang angkatan kerja, atau 3.077 orang telah bekerja.

Sementara itu, dari jumlah 72.250 orang yang bekerja, sektor jasa tercatat menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak tahun 2019, yakni sebanyak 52.561 orang, yang terdiri

dari 26.995 orang, dan perempuan 25.566 jiwa. Kemudian menyusul sektor manufaktur, yang menyerap tenaga kerja 13.728 orang, yang terdiri dari 10.473 orang laki-laki, dan 3.255 orang perempuan.

Sedangkan sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 5.961 orang, yang terdiri dari laki-laki 4.647 dan perempuan 1.314 orang. Selanjutnya, untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama didominasi menjadi buruh, karyawan, atau pegawai, sebanyak 45.570 orang. Kemudian orang berusaha sendiri sebanyak 14.122 jiwa, dan pekerja bebas sebanyak 342 orang. Sedangkan orang yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 4.342 orang, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 3.882 orang, dan pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 3.992 orang.

Penurunan angka pengangguran terbuka ini, mampu dicapai pemerintah Kota Palopo dengan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan *job fair* dimana pada tahun 2019, Pemerintah Kota Palopo melaksanakan *event* ini sebanyak dua kali dan diikuti oleh ribuan pencari kerja dan puluhan penyedia lapangan kerja baik lokal maupun regional (Sulsel).
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui serangkaian pelatihan ketenaga kerjaan, yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada, sehingga angkatan kerja yang ada berkualifikasi dan kompeten. Bukan hanya pada dinas tenaga kerja tapi pada dinas lainnya juga.
3. Meningkatkan jumlah dan investasi yang masuk ke Kota Palopo dengan memantapkan pelayanan perizinan usaha daerah yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat, melalui pelayanan terpadu satu pintu. Peningkatan investasi ini kemudian mampu menyerap dan membuka lapangan kerja.
4. Mengakselerasi pengembangan sektor informal Kota Palopo terutama Jasa dan Perdagangan, yang mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang ada.
5. Mengembangkan beberapa destinasi-destinasi berusaha yang baru bagi masyarakat terutama di sector perdagangan, seiring dengan pembinaan wirausaha dan jiwa kewirausahaan dalam menciptakan dan mengembangkan skala usaha yang sudah ada. Dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi penguatan dan pengelolaan usaha dan daya saing produk.
6. Meningkatkan jumlah dan nilai proyek infrastruktur strategis daerah yang padat karya dan menyerap tenaga kerja local, pada sejumlah perangkat daerah yang melaksanakannya. Termasuk pengelolaan dana kelurahan yang menyasar proyek-proyek berbasis swakelola masyarakat.
7. Membangun jejaring kerjasama dengan dunia usaha dan pemerintah daerah yang berbatasan terutama pengembangan kawasan strategis pada daerah perbatasan, misalnya dukungan kepariwisataan.

8. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan dunia usaha melalui *event-event* seperti *job fair*, dalam rangka memfasilitasi atau mempertemukan tenaga kerja dengan pemilik lapangan kerja. Upaya ini sekaligus meningkatkan akses angkatan kerja terhadap informasi dan kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah dunia usaha. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Palopo melaksanakan dua kali iven *job fair* yang diikuti dunia usaha dari lokal, maupun regional (Sulsel).

Tabel 3.3.37

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 9 dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
95,1	83,61

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 2,950,250,000 yang dikelola oleh tiga perangkat daerah yakni Dinas Tenaga Kerja, DPMPSTSP dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi kinerja anggaran sebesar Rp 2,466, 703,768 atau **83.61%**.

Jika persentase realisasi keuangan tersebut **DIBANDINGKAN** dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran sembilan yang berpredikat sangat tinggi (95,1%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan).

Berikut adalah table program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran sembilan.

Tabel 3.3.38

Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 9

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	879,535,000	463,025,000	52,64
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	94,100,000	94,050,000	99,95
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	600,000,000	588,408,000	98,068
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	157,900,000	157,713,768	99,9

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1,075,715,000	1,042,915,000	96.95
Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	143,000,000	120,592,000	84
Rata-rata Realisasi	2,950,250,000	2,466,703,768	83,61

Sasaran X : Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S.10)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ke sepuluh sebesar **95.1** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **95.1** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran ke sepuluh, nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran ke sepuluh hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.3.39
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 10

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S. 10)	PDRB per kapita (Juta/Thn)	37.1	43.02	116.0%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				116.0	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN X				116.0	Sangat Tinggi

Sesuai RPJMD Kota Palopo 2018-2023, Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan peningkatan produksi dan produktifitas daerah di Kota Palopo adalah meningkatnya PDRB per Kapita setiap tahunnya. Angkanya diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.

Sesuai hasil evaluasi capaian kinerja sasaran kesepuluh yang memiliki 1 Indikator Kinerja, angka atau nilai rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 116.00 % atau berada/melebihi target daerah 2019. Olehnya sesuai skala ordinal yang ada, predikat kinerjanya SANGAT TINGGI. Berikut adalah hasil pengukuran kinerja indikator sasaran pembangunan daerah ke sepuluh Kota Palopo.

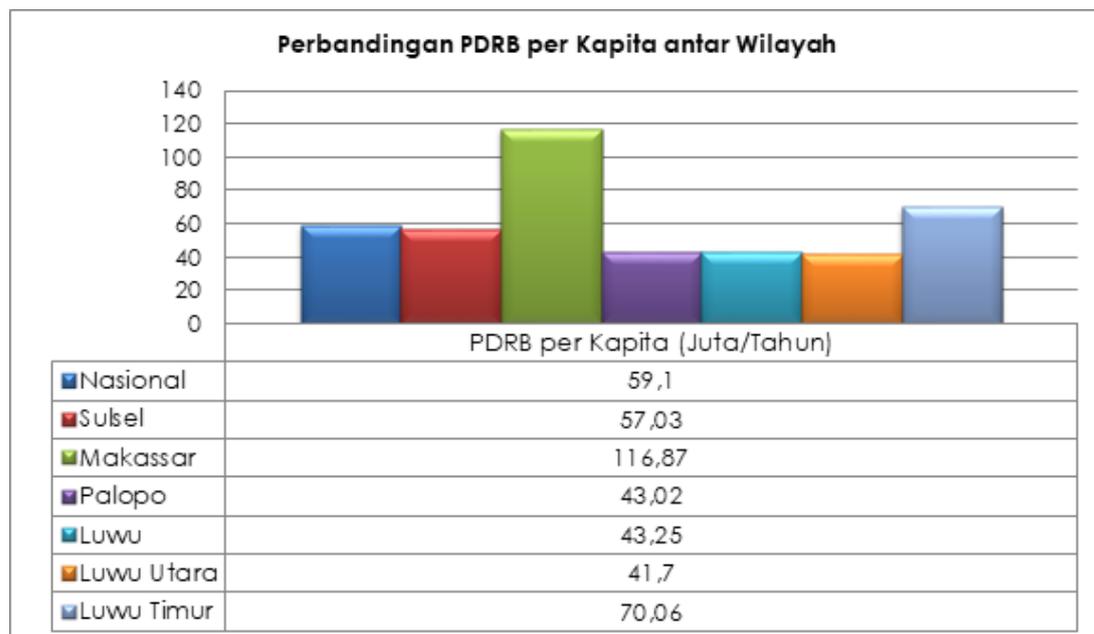
Tabel 3.3.40
Pengukuran Kinerja Sasaran 10

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2018	Realisasi 2019			
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S.10)	PDRB per Kapita (Jt./Thn.)	40.32	37.1	43.02	116%	37.8	113.81

Angka PDRB per Kapita Kota Palopo tahun 2019 sebesar 43.02 Juta/Tahun. Ini lebih baik dari tahun 2018 yang berada pada angka 40.32 Juta/Tahun. Bahkan juga melampaui target daerah 2019 yang berada pada angka 37.1 Juta/Tahun. Bahkan juga telah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2023, yang berada pada angka 37.8 Juta/Tahun. Angka PDRB per Kapita Kota Palopo 2019 lebih tinggi/meningkat sebanyak 2.7 Juta/Tahun, dibandingkan tahun 2018.

Jika dikomparasikan dengan daerah/kota Lain di Sulawesi Selatan, PDRB per Kapita Kota Palopo 2019, lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu Utara (41.70 Juta/Tahun), tetapi belum lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu (43.25 Juta/Tahun), Luwu Timur (70.06 Juta/Tahun), Kota Pare-Pare (49.80 Juta/Tahun), Kota Makassar (116.87 Juta/Tahun). Pada level regional dan nasional, PDRB per Kapita Kota Palopo juga masih jauh dibawah rata-rata PDRB per Kapita Sulsel 2019 (57.03 Juta/Tahun), dan nasional (59.1 Juta/Tahun).

Grafik perbandingan PDRB Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Meningkatnya produksi dan produktifitas di Kota Palopo juga ditandai dengan meningkatnya angka PDRB (baik Konstan maupun harga berlaku). Perbandingan PDRB (Milyar) Kota Palopo :

Tahun	PDRB	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2019	7.942,48	5.447,36
2018	7.285,14	5.102,99
2017	6.514,94	4.745,90

Hingga tahun 2019, nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 7,94 triliun rupiah atau naik sebesar 657 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 5,44 triliun rupiah atau naik sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi yang diberikan Kota Palopo terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Nilai PDRB Kota Palopo di tahun 2019 sebesar 7,94 triliun rupiah hanya memberikan kontribusi sebesar 1,57 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

**Kontribusi PDRB Kota Palopo terhadap PDRB Sulawesi Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016- 2018 (Persen)**

Tahun	PDRB Sulawesi Selatan (Miliar Rp)	PDRB Kota Palopo (Miliar Rp)	% Kota Palopo thd Sulawesi Selatan
2019	504.746,87	7.942,48	1,57
2018	461.719,49	7.285,14	1,58
2017	415.588,20	6.514,94	1,57

PDRB per Kapita dipengaruhi dua faktor kunci yakni, **Jumlah atau Nilai PDRB** (Harga Berlaku maupun Konstan) dan **Jumlah Penduduk**. Kedua factor ini menjadi focus perhatian pemerintah Kota Palopo dalam mengakselerasi peningkatan PDRB per Kapita.

Beberapa hal yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo untuk meningkatkan pendapatan per Kapita Masyarakat tahun 2019 adalah :

Meningkatkan nilai/angka PDRB :

- a. Mempermudah dan menyederhanakan perizinan daerah sehingga lebih cepat, lebih mudah dan lebih jelas, sehingga mampu mewujudkan peningkatan nilai investasi daerah sebesar Rp. 129,440,222,514 pada tahun 2019 dengan serapan tenaga kerja sebanyak 763 orang.
- b. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sehingga SDM lebih produktif.

- c. Meningkatkan sector sector produktif daerah
- d. Mengakselerasi infrastuktur daerah yang mendukung sector sector ekonomi daerah. (hulu-hilir)
- e. Menegakkan upah dan gaji buruh sesuai UMP
- f. Mengakselerasi sector swasta dan dunia usaha melalui stimulant dan fasilitasi agar berkembang.
- g. Menciptakan dukungan infrastruktur baik secara fisik, non fisik maupun dari SDM yang akan digunakan dalam berbagai bidang

Mengendalikan Jumlah Penduduk

1. Pemerintah Kota Palopo juga gencar melaksanakan program pengendalian jumlah penduduk, yakni program keluarga berencana yang diimplementasikan dalam program kampung KB. Sampai dengan tahun 2019, kampung KB sudah ada di 10 Kelurahan (20.41%), tahun 2018 hanya ada di 9 kelurahan. Kampung KB ini difokuskan pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi seperti di pesisir Kota Palopo, daerah dengan pemukiman kumuh dan kantong kemiskinan.
2. Menekan laju pertumbuhan penduduk dimana pada tahun 2019 sebesar 2.18%, dimana pada tahun 2017 2.31%.

Penduduk Kota Palopo Tahun 2017- 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2017	2018	2019
1	Jumlah	Jiwa	176.907	180.678	184.614
2	Laki-Laki	Jiwa	85.967	87.812	89.917
3	Perempuan	Jiwa	90.94	92.866	94.697
4	Pertumbuhan	%	2,97	2,13	2,18
5	Densitas	Jiwa/Km2	715	730	746
6	Sex Ratio	%	94,53	94,56	94,27

Sumber Data : Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2019

Tabel 3.3.41

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 10 dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
116	76,60

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar Rp.9,913,006,382 yang dikelola oleh lima perangkat daerah dengan realisasi kinerja keuanghan 7,593,603,130 atau 76.60 %. Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran sembilan yang berpredikat sangat tinggi (116%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan).

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran sembilan.

Tabel 3.3.42
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 10

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	6,100,000	6,100,000	100.00
Program pengembangan industri kecil dan menengah	47,500,000	46,974,400	98.89
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	257,957,500	254,585,973	98.69
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	107,000,000	106,656,167	99.68
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	24,100,000	24,090,000	99.96
Program pengembangan budidaya perikanan	185,115,000	181,911,900	98.27
Program pengembangan perikanan tangkap	454,509,000	453,661,370	99.81
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	123,666,950	123,568,820	99.92
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Air Tawar	29,300,000	29,275,000	99.91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1,558,019,000	1,534,477,000	98.49
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	292,255,000	290,882,500	99.53
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	193,690,000	193,079,754	99.68
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	175,000,000	174,900,434	99.94

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	324,420,000	257,978,798	79.52
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	668,020,400	666,973,140	99.84
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	182,460,000	182,412,615	99.97
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	281,497,386	276,947,986	98.38
Program peningkatan produksi hasil peternakan	2,185,468,146	2,161,172,571	98.89
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	58,500,000	58,490,106	99.98
Program peningkatan produksi peternakan	56,220,000	56,220,000	100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian	2,702,208,000	513,244,596	18.99
Rata-rata Realisasi	9,913,006,382	7,593,603,130	76.60

Sasaran XI : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ke sebelas sebesar **83,8** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **83,8** atau memiliki predikat **Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran ke sebelas, nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran.

Tabel 3.3.43
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 11

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASA- RAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.15	0.05	33,33	Sangat Rendah
	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.8	3,76	134,38	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				83,8	Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN XI				83,8	Tinggi

Sektor Pariwisata

Nilai atau angka kontribusi sektor pariwisata di Kota Palopo tahun 2019 sebanyak Rp. 82.100.000 atau sebesar 0,05% dari Total PAD Kota Palopo tahun 2019 sebesar Rp. 164.812.192.980,-. Capaian ini hanya berkontribusi 33,33% target tahun 2019 yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Palopo.

Sektor Ekonomi Kreatif

Sementara nilai atau angka retribusi dari sector ekonomi kreatif Kota Palopo sebesar Rp. 6.201.259.135,- atau sebesar 3,76% dari total PAD Kota Palopo. Capaian ini telah melampaui target tahun 2019 yaitu 2,8%. Dengan demikian tingkat capaian kinerja untuk indikator kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 134,38% atau Sangat Tinggi.

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar 46.18 Milyar yang dikelola beberapa perangkat daerah dengan realisasi kinerja keuangan 44.81 Milyar **atau 97.03%**.

Jika persentase realisasi keuangan tersebut **DIBANDINGKAN** dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran sepuluh yang berpredikat sangat berhasil (**271.65 %**), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan).

Tabel 3.3.44
Pengukuran kinerja sasaran 11

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2018	Realisasi 2019			
Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah	0,09	0,15	0,05	33,33	0,24	20,83
	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap pendapatan asli daerah	3,65	2,80	3,76	134,38	2,88	97,22

Dari tabel 3.3.44 diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2019 untuk indikator kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah adalah 0,05. Capaian ini jauh dibawah target tahun 2019 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 0,15. Namun Capaian ini lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 yang hanya pada 0,09. Jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 0,24, maka capaian ini baru mencapai 20,83% dari target.

Untuk indikator yang kedua yaitu kontribusi ekonomi kreatif terhadap pendapatan asli daerah tahun 2019 realisasinya adalah 3,76. Capaian ini telah melampaui target tahun 2019 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu nilai 2,80, sehingga capaian kinerjanya adalah 134,38%. Namun capaian ini sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2018 yang berada pada 3,65.

Tabel 3.3.45
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 11 dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
83,8	97,30

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 mengalokasikan belanja sebesar Rp.46.182.321.000 yang dikelola oleh tujuh perangkat daerah yaitu Dinas Pariwisata dan Ekraf, Dinas PU PR, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM dengan realisasi kinerja keuangan 44.812.271.947 atau 97,03 %.

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran sembilan.

Tabel 3.3.46
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 11

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program pengembangan pemasaran pariwisata	223,700,000	223,613,844	99.96
Program pengembangan destinasi pariwisata	386,700,000	384,564,635	99.45
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	193,180,000	189,483,900	98.09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pariwisata	2,370,578,000	2,324,077,887	98.04
Program Pengembangan Nilai Budaya	100,000,000	97,938,100	97.94
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	384,621,200	384,215,200	99.89
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	111,360,000	109,052,900	97.93
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	191,035,000	190,866,500	99.91
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	37,135,000	37,134,900	100.00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1,463,972,000	1,463,657,500	99.98
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	49,999,000	49,992,000	99.99
Program pembangunan jalan dan jembatan	40,670,040,806	39,357,674,581	96.77
Rata-Rata Realisasi Keuangan	46,182,321,006	44,812,271,947	97.03



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas RPJMD Kota Palopo Tahun 2019-2023. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Palopo telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparat Pemerintah Kota Palopo serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Kota Palopo sebagai kota maju, inovatif dan berkelanjutan pada tahun 2023. Pemerintah Kota Palopo secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar **99,01%** yang

dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; mendorong percepatan proses pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan; meningkatkan profesionalisme aparatur pegawai pemerintah dan pengawasan; dan mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KOTA PALOPO



WALIKOTA PALOPO

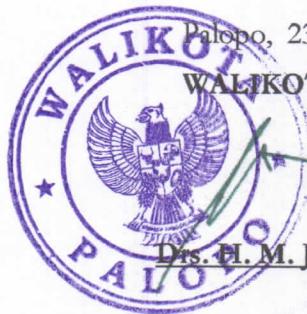
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H**
Jabatan : Walikota Palopo

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Palopo, 23 Januari 2020

WALIKOTA PALOPO

Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA PALOPO**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2020
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	1 Indeks Pembangunan Manusia (Point)	Point	77.98
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	2 Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	Tahun	10.39
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	3 Angka Harapan Hidup	Tahun	70.34
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	4 Persentase Penduduk Miskin (%)	%	7.64
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	5 Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	Angka	81
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	6 Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	%	0
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	7 Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	Rasio	11.47
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	8 Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	Ha	15
	9 Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	76.93
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)	10 Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Nilai	66
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	11 Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	75
	12 Level SPIP Daerah (Point)	Point	3
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	13 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	Point	81.12
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	14 Pertumbuhan PDRB (%)	%	7.16
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	15 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	9.51
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S.10)	16 PDRB per kapita (Juta/Tahun)	Juta/tahun	37.3
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)	17 Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	%	2.2
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	18 Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	%	0.17
	19 Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	%	2.82

PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2020

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	39.962.619.350
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	141.395.000
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	23.623.869.000
	Program Pendidikan Kesetaraan	26.000.000
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	133.605.000
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	127.762.600
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan	8.843.847.750
	Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis	7.066.140.000
2	KESEHATAN	96.600.726.847
	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.125.000
	Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.700.000
	Program Pelayanan Kesehatan Balita	30.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Orang Tua Terduga Tuberkolosis	19.280.000
	Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	18.525.000
	Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.950.000
	Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.475.000
	Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	9.100.000
	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	5.400.000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.607.995.000
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	28.278.423.212
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	14.485.717.442
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan	301.636.600
	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pusekesmas Pembantu dan Karingannya	730.000.000
	Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	2.640.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan	38.536.142.593
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik	8.906.257.000
3	RSUD	124.883.233.915
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan	34.266.233.915
	Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	90.617.000.000
4	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	188.298.195.200
	Program Pembangunan Jalan & Jembatan	29.599.620.000
	Program Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	543.349.125
	Program pembangunan / rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	2.815.100.000
	Program pembangunan/ Rehabilitasi turap/talud/bronjong	2.035.000.000
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	100.000.000
	Program pembangunan infrastruktur publik/strategis daerah	134.550.828.025

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai dan sumber daya air lainnya	50.000.000
	Program Pengendalian Banjir	100.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	16.887.954.150
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	1.616.343.900
5	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	3.635.286.600
	Program Pengembangan Perumahan	834.455.000
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	42.758.200
	Program Rumah Layak Huni	207.390.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.550.683.400
6	BAPPEDA	1.397.159.700
	Program Perencanaan Pengembangan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	425.300.000
	Program perencanaan dan Pengendalian pembangunan daerah	640.260.000
	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sosial Budaya	331.599.700
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	108.103.000
	Program Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah	47.250.000
	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	60.853.000
8	DINAS PERHUBUNGAN	1.529.351.620
	Program Pembangunan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	27.138.090
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1.100.115.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi	402.098.530
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN	21.698.167.397
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.865.838.692
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	316.641.000
	Program Pelayanan Pemakaman dan Pengelolaan Pertamanan	3.017.495.700
	Program peningkatan sarana dan prasarana bidang penerangan jalan umum	9.242.092.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup	256.100.000
10	DINAS PERTANAHAN	10.117.600.000
	Program Pelayanan Pertanahan	10.066.100.000
	Program perencanaan dan pengendalian tanah	51.500.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	930.633.500
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil	130.062.500
	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	800.571.000

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	670.672.500
	Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	270.672.500
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	400.000.000
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	5.111.348.420
	Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	1.619.567.120
	Program Kesehatan Keluarga Sejahtera	36.139.300
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana	3.455.642.000
14	DINAS SOSIAL	6.509.364.580
	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	104.500.000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6.190.260.580
	Program Pembinaan Anak Terlantar	65.051.000
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Naroba dan Penyakit Sosial lainnya)	149.553.000
15	DINAS TENAGA KERJA	3.868.360.245
	Program rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	193.250.000
	Program rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	21.491.200
	Program rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	92.250.000
	Program rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	15.432.095
	Program perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	131.413.750
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan kepahlawanan	57.947.100
	Program bantuan non tunai	84.039.000
	Program pemberdayaan dan pembinaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	3.272.537.100
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	709.358.000
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	264.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	445.358.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.867.500.000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	145.400.000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	722.600.000
	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	999.500.000
18	DINAS KEBUDAYAAN	154.600.000
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	63.000.000
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	91.600.000

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
19	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA	1.568.379.700
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	787.629.700
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	340.750.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	440.000.000
20	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.630.400.000
	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.398.400.000
	Program Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Masyarakat	1.232.000.000
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN	1.497.846.290
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	186.796.290
	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1.311.050.000
22	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	784.781.200
	Program Penanganan konflik dan Perlindungan Masyarakat	488.001.000
	Program Peningkatan Demokratisasi Ideologi dan Pembauran	135.405.000
	Program pendidikan politik masyarakat	161.375.200
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	371.370.000
	Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	371.370.000
24	SEKRETARIAT DAERAH	34.703.837.500
	Program pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan	11.064.450.600
	Program pelaporan kinerja dan keuangan	139.967.470
	Program tata laksana kelembagaan, reformasi birokrasi dan layanan publik	426.650.000
	Program penguatan tata kelola pemerintahan	392.500.000
	Program keagamaan dan kesejahteraan sosial kemasyarakatan	6.457.750.000
	Program koordinasi pengelolaan perekonomian daerah	299.900.000
	Program pembinaan dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	545.887.500
	Program pengelolaan administrasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	169.409.730
	Program pengelolaan ketatausahaan, keprotokoleraan dan rumah tangga	4.298.300.000
	Program pengembangan pengelolaan kehumasan	3.577.825.000
	Program kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah	299.988.000
	Program pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan TPTGR	112.039.200
	Program penataan produk hokum dan pelayanan bantuan hukum	943.170.000
	Program pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	5.976.000.000
25	SEKRETARIAT DPRD	7.024.920.000
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	6.703.920.000
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	321.000.000
26	INSPEKTORAT DAERAH	1.918.040.000
	Program peningkatan sistem pengawasan internal	1.913.040.000
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	5.000.000

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.495.456.845
	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	731.650.000
	Program Pelayanan Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir	516.330.000
	Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya Aparatur	4.247.476.845
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.049.657.600
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.905.157.600
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	1.144.500.000
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.644.059.000
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	3.644.059.000
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	148.717.400
	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	105.260.400
	Program Peningkatan Produktivitas Kawasan Hunian dan Lingkungan Pemukiman	43.457.000
31	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK	135.125.000
	Program pengembangan data/informasi/statistik sektoral	97.400.000
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	37.725.000
32	DINAS KEARSIPAN	83.077.700
	Program pembinaan kearsipan	61.000.000
	Program Pengelolaan Arsip	22.077.700
33	DINAS KOMUNIKASI & INFORMASI	571.275.000
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	541.400.000
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemkot	29.875.000
34	DINAS PERPUSTAKAAN	153.854.000
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	153.854.000
35	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	3.410.476.550
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	214.510.000
	Program peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian	1.291.401.500
	Program peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil perkebunan	93.850.000
	Program peningkatan dan pemasaran hasil peternakan	1.810.715.050
36	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	871.229.250
	Program pengembangan pemasaran dan kemitraan pariwisata	88.750.000
	Program pengembangan destinasi pariwisata	25.400.000
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	60.400.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pariwisata	696.679.250
37	DINAS PERIKANAN	2.841.851.290
	Program pengembangan perikanan budidaya	146.718.300
	Program pengembangan perikanan tangkap	935.087.520

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program peningkatan pengelolaan dan pemasaran perikanan	77.500.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.682.546.100
38	DINAS PERDAGANGAN	27.306.040.130
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	120.474.500
	Program pembinaan perdagangan	26.060.314.780
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam DAK Bidang Perdagangan	1.125.250.850
39	DINAS PERINDUSTRIAN	234.013.600
	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	3.858.000
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	102.708.000
	Program pembinaan dan pengembangan industry potensi daerah	127.447.600
40	DINAS TRANSMIGRASI	300.000.000
	Program pengembangan kawasan transmigrasi	300.000.000
JUMLAH PAGU BELANJA LANGSUNG		609.796.688.929



Palopo, 21 Januari 2019

WALIKOTA PALOPO

Drs. HCM. JUDAS AMIR, M.H